

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia sangat besar, Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan seni budaya. Membentang dari Aceh sampai Papua dengan keanekaragaman obyek wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah hingga religi dan wisata kuliner. Berbagai macam wisata tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki wisata sangat populer. Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi salah satu faktor penunjang yang penting bagi pemerintah untuk melaksanakan pengembangan di daerahnya, sehingga upaya tersebut mampu menghasilkan daya saing pariwisata Indonesia di dunia. Daya saing tersebut dibuktikan dengan dianggarkannya dana khusus untuk membangun kepariwisataan melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan daerah misalnya dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Melalui adanya dana khusus yang dianggarkan, pariwisata mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait telah menganggarkan dalam APBN pembangunan infrastruktur pariwisata maupun pendukung pariwisata. Pembangunan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah secara maksimal. Pemanfaatan sumber daya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan akan berdampak pada pendapatan daerah tersebut. Pendapatan tiap daerah tentunya berbeda-beda, ini ditinjau dari beberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut serta bagaimana pengelolaannya. Menurut Adisasmita (2011:144) sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan suatu desentralisasi salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut

Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pariwisata termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah, karena pariwisata yang akan dibahas adalah pariwisata alam yang dikelola masyarakat sekitar.

Pariwisata merupakan sub sektor dari salah satu sektor yang menarik untuk dikembangkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, di sini sektor pariwisata dapat menyerap sumber daya alam dan sumber daya manusia secara bersama-sama (Utami, 2016). Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat 1 dan 2 yaitu:

“(1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional”.

Hal tersebut dikarenakan adanya wisatawan yang datang. Kedatangan wisatawan tersebut ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut (Trisnanda, 2015). Pembangunan sektor pariwisata guna meningkatkan terciptanya lapangan pekerjaan adalah hal yang wajib dilakukan karena di Indonesia masih banyak pengangguran sehingga perlu dikembangkan melalui sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu dengan menciptakan pariwisata.

Sesuai dengan Peraturan menteri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan. Berdasarkan data laporan kinerja kementerian pariwisata Indonesia pada tahun

2018 kondisi kepariwisataan nasional tahun 2018 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB nasional sebesar 5,25% atau senilai Rp 229,50 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 176-184 triliun dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,7 juta orang. Pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 15,81 juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 303,4 juta perjalanan.

Hasil dari temuan data tersebut merupakan peranan pariwisata dalam pembangunan masyarakat yang mengharuskan pemerintah menggalakkan pariwisata di berbagai daerah sekaligus menempatkannya sebagai pendekatan pembangunan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan wisata adalah memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Munculnya kebijakan desentralisasi juga dapat memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus segala potensi yang dimilikinya berdasarkan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya urusan pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal ini pariwisata merupakan bagian dari urusan pemerintah pilihan, sama dengan kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan.

Didesentralisasikannya urusan pariwisata, berarti daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang pariwisata sesuai dengan potensi geografis yang dimilikinya. Termasuk Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi alam yang bisa dijadikan wisata.

Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, secara geografis wilayah kabupaten terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi, yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Lemongan. Kabupaten Lumajang juga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda provinsi Jawa Timur. Di bagian barat yakni perbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo, terdapat rangkaian Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Gunung Semeru merupakan Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Wilayah yang tergolong luas berupa pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi dan pantai yang panjang menjadikan Kabupaten Lumajang memiliki banyak destinasi wisata sebagai berikut.

- a. Daerah pegunungan terdapat objek wisata gunung Semeru, gunung Lemongan, dan puncak B-29 negeri di atas awan yang merupakan destinasi unggulan Lumajang bagi para wisatawan untuk menikmati keindahan alam dari puncak gunung.
- b. Daerah pantai terdapat pantai Watu Godek, Watu Pecak, pantai Bambang sampai pantai Wotgalih.
- c. Daerah hutan terdapat wisata hutan Bambu, hutan Pinus dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
- d. Daerah aliran sungai terdapat wisata Air Terjun Goa Tetes, Kapas Biru, Tumpak Sewu dan Coban Pelangi

Berdasarkan keterangan di atas, lebih jelasnya melihat Gambar 1.1 berikut.



Sumber: Pariwisata Lumajang, 2012

Gambar 1.1 Peta Wisata Kabupaten Lumajang

Adanya pariwisata mempunyai manfaat yang sangat luas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Pengembangan wisata pedesaan maupun desa wisata merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa, kegiatan ekonomi di desa akan meningkat dengan kedatangan para wisatawan, peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat pun otomatis terbuka. Dampak positif lainnya, masyarakat desa tidak tertarik lagi untuk pergi ke kota maupun luar kota dalam rangka mencari pekerjaan, karena berbagai peluang kerja dan kesempatan usaha makin terbuka lebar di desa seiring dengan berkembangnya kegiatan wisata tersebut sehingga dengan adanya pembangunan desa wisata akan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berhak menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu potensi yang ada di desa adalah

memanfaatkan potensi alamnya untuk dijadikan sektor pariwisata. Sektor pariwisata bisa dibidang berpotensi untuk dikembangkan di suatu desa karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Besarnya peluang di sektor pariwisata membuat daerah melakukan kerja sama untuk membangun atau mengelola potensi wisata yang ada di sekitarnya.

Salah satunya adalah di desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro, karena setelah melakukan observasi awal di desa tersebut khususnya pada peningkatan ekonomi maupun peluang kerja sangat signifikan. Terlebih dengan didirikannya suatu desa wisata mendorong pemerintah desa untuk berinovasi menciptakan hal-hal yang baru agar dapat menyejahterakan kehidupan masyarakatnya. Desa wisata Sumber Mujur ini memiliki sejumlah keunggulan salah satunya terdapat pada satu objek yaitu sebuah hutan yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis bambu, dengan adanya hal itu menjadikan desa wisata ini sangat unik karena memiliki hutan yang berbeda dengan hutan lainnya. Hutan yang lain biasanya ditumbuhi pohon-pohon yang rindang sedangkan hutan di desa Sumber Mujur ini ditumbuhi bambu dengan beraneka ragam jenisnya. Bambu yang dianggap oleh sebagian orang itu barang murahan dan tidak memiliki nilai jual tetapi ketika di kelola dengan baik dan benar maka bambu yang biasa saja akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Seperti di Desa Sumbermujur, warga sekitar memanfaatkan bambu untuk dijadikan kerajinan seperti sedotan, mangkok, gelas, asbak, piring, dan peralatan lainnya. Terbukti, dengan bermanfaatnya nilai bambu bagi masyarakat sekitar yang dahulu dianggap tidak berguna sekarang menjadi sangat berguna dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi meskipun pemasarannya hanya sebatas kepada wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung kesana.

Peneliti fokus kepada desa wisata yang berada di desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Desa Sumber Mujur memiliki topografi di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 450m – 500m di atas permukaan laut dan luas wilayah 574,77 Ha. Desa wisata Sumber Mujur sendiri ditetapkan pada tahun 2017 melalui Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang destinasi wisata bahwa satu kecamatan satu desa wisata. Potensi yang dimiliki desa Sumber Mujur sendiri yaitu panorama alam yang indah dan

memiliki banyak macam tanaman bambu yang terbentang luas kurang lebih 17 Hektar area, sehingga dapat menjadi wisata yang unik serta berbeda dari tempat wisata lainnya. Terpendamnya potensi wisata menggerakkan desa Sumber Mujur memiliki destinasi baru dan tidak kalah dengan destinasi wisata lainnya yang berada di Kabupaten Lumajang yaitu Hutan Bambu Sumber Mujur Lumajang yang memanfaatkan potensi alamnya seperti keberadaan hutan yang tumbuh dengan asri dan terdapat puluhan jenis bambu yang terpapar pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jenis Bambu di Desa Wisata Hutan Bambu

No.	Jenis Bambu	No.	Jenis Bambu
1.	Apus	11.	Tolop
2.	Taman Budha	12.	Thailand
3.	Wuluh	13.	Totol
4.	Tali	14.	Hias Kerdil
5.	Rampal	15.	Hias tak berlubang
6.	Jakarta	16.	Jabal
7.	Petung Hijau	17.	Petung Hitam
8.	Ori	18.	Kuning
9.	Ampel	19.	Jerinjing
10.	Jajang		

Sumber : Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru, 2020

Bambu membentuk seperti sebuah terowongan besar ditambah cuaca yang sejuk dan indah serta pemandangan alam yang menambah keasrian dari hutan bambu tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Sumber : Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru, 2020

Gambar 1.2 Kawasan Hutan Bambu Kabupaten Lumajang

Tak hanya itu di dalam kawasan hutan bambu juga terdapat ribuan kelelawar atau disebut dengan kalong dan ratusan kera sehingga menambah keanekaragaman satwa yang ada di kawasan hutan bambu tersebut. Selain Hutan Bambu dan sungai yang sangat jernih di dalamnya terdapat wahana seperti kolam renang dan setiap tahunnya diadakan berbagai festival sebagai ajang untuk mempromosikan hutan bambu tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat luas baik lokal maupun mancanegara. Konsepsi yang terbangun dalam pembentukan desa wisata Sumber Mujur ini yaitu selain keindahan alam dengan hamparan hutan dan pemandangan alam yang indah tetapi juga didukung oleh faktor legenda/mitos yang berkembang di masyarakat desa Sumber Mujur, yaitu adanya kepercayaan mistik bahwa tidak diperbolehkan menebang pohon bambu sembarangan. Sebelum dibentuknya menjadi destinasi wisata juga tempat tersebut sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ada disekitar desa Sumber Mujur akan tetapi pemerintah desa Sumber Mujur dan masyarakat masih belum sadar untuk dijadikan sebagai objek wisata dan hanya dikelola secara sukarela saja.

Hutan Bambu sudah ada sejak jaman era kolonial Belanda, kemudian semenjak kedatangan Jepang kawasan tersebut mulai rusak. Ketika sudah menjadi aset desa, warga kembali menjaga dan melestarikannya. Hutan bambu akan terus dikembangkan potensinya menjadi objek wisata dikarenakan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan wisata-wisata lain dan akan memberikan peluang kepada kesejahteraan masyarakat terutama desa Sumber Mujur. Hal itu menjadikan Desa Wisata Hutan Bambu tidak hanya dikelola oleh pemerintah desa Sumber Mujur saja yang kedudukannya sebagai pemilik kewenangan yang dominan dalam mengelola wisata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakatnya yang turut berpartisipasi dalam mengelola wisata tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Sumber Mujur.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata di desa Sumber Mujur yaitu dengan membentuk dan menjadi bagian dari kelompok sadar wisata yang merupakan bagian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Satu Desa Satu Wisata pasal 3 ayat 1 berbunyi sebagai berikut.

“Dalam rangka mengembangkan daerah tujuan wisata dengan pembentukan destinasi wisata dengan kebijakan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) desa wisata.”

Adanya peraturan tertulis tersebut, maka sangat diperlukan adanya organisasi di lapangan agar pembentukan desa wisata berjalan lancar. Organisasi ini berupa kelompok. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator untuk melakukan pembinaan, pelatihan, promosi serta membentuk kelompok sadar wisata di Kabupaten Lumajang. Adanya peraturan tersebut maka sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Mujur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dibentuklah POKDARWIS “Sabuk Semeru”.

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerah sesuai dengan unsur sadar wisata dan Sapta Pesona. POKDARWIS sendiri merupakan bagian dari konsep *Community Based Tourism* (CBT) yaitu pariwisata berbasis masyarakat/komunitas. Pengelolaan pariwisata melalui CBT yaitu konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial budayanya. CBT mengedepankan pendekatan *bottom-up* dalam pengelolaannya yang mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengelolaan pariwisatanya yang berasal dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pokdarwis “Sabuk Semeru” yang tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat sekitar.

Pengelolaan pariwisata menurut Fandeli (dalam Azhari, 2018), pengelolaan wisata sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan tempat atau objek wisata dengan cara mengatur, membina dan memelihara obyek serta mengatur dan mengawasi pengunjung dengan organisasi pengelola yang ada. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut antara lain, memanfaatkan tempat atau objek wisata; mengatur, membina dan memelihara objek wisata; mengatur dan mengawasi pengunjung; dan organisasi pengelola objek wisata. Sunaryo (2013:142) berpendapat bahwa pengelolaan pariwisata yang baik tentunya harus melibatkan masyarakat, proses pengelolaan yang terdiri dari sebuah perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, pengawasan dan adanya pemanfaatan hasil industri dari kegiatan pariwisata. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengelola dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona Hutan Bambu di desa Sumber Mujur.

Pada pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumber Mujur, pemerintah desa dan kelompok sadar wisata sangat bersungguh-sungguh dalam mengelola potensi alam yang dimiliki desa. Potensi wisatanya ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung yang berdatangan di desa tersebut. Hal ini menambah semangat warga untuk terus mengembangkan desa wisata Hutan Bambu, selain itu ekonomi warga sekitar terangkat karena banyak lapangan pekerjaan misal sebagai pedagang, membuka usaha homestay, objek wisata, pemandu wisata, warung, souvenir, penyewaan kamar mandi ataupun petugas kebersihan.

Pelaksanaan kegiatan Desa Wisata Hutan Bambu di Desa Sumber Mujur dilakukan oleh POKDARWIS yang telah dibentuk berdasarkan tugas masing-masing anggota kepengurusan. Dengan adanya kelompok ini dilatarbelakangi kemauan yang kuat dari pemerintah desa Sumber Mujur sehingga menjadikan faktor pendukung untuk POKDARWIS mengelola wisata Hutan Bambu yang lebih baik. Telah dilakukan wawancara kepada bapak wakil ketua POKDARWIS pengelolaan desa wisata ini pada saat pengamatan, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2014 dulu desa wisata ini kurang menarik perhatian masyarakat karena

minimnya promosi kemudian ditambah lagi kurangnya penjagaan di area wisata yang menjadikan tempat wisata area Hutan Bambu kurang aman, ujar bapak Agus.

Pernyataan tersebut yang mendorong pemerintah desa untuk berpikir bagaimana caranya agar permasalahan yang ada segera mendapatkan solusi. Kemudian pada tahun berikutnya mulai berkembang, seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota POKDARWIS bahwa tahun 2015 sampai sekarang sering diadakan rapat mengenai kekurangan dan kelebihan dari wisata Hutan Bambu. Kekompakan POKDARWIS tersebut membuahkan hasil yang baik. Seperti Desa Sumber Mujur yang sekarang ramai dan terjadi lonjakan jumlah wisatawan di hari biasa, akhir pekan maupun hari libur nasional, dan memiliki akses jalan serta penerangan yang baik menuju tempat pariwisata. Hal ini tidak terlepas dari kompaknya dan pembinaan POKDARWIS dari pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas peran dari kelompok tersebut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pembinaan Kelompok Sadar Wisata pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

“Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran, dan kedudukan dalam konteks pembangunan kepariwisataan di desa wisata. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis.”

Peraturan di atas dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat desa Sumber Mujur sehingga antara kalangan masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan timbal balik. Data dan fakta yang terjadi di lapangan telah diuraikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Perbandingan dari tahun 2014-2019

2014-2016	2017-2019
<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat sangat berperan terhadap pengembangan pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat, kelompok, dan pemerinta desa bersatu dalam mewujudkan pembangunan pariwisata.
<ul style="list-style-type: none"> Jalan ke area wisata kurang memadai dan Aspal banyak yang rusak serta yang melewati jalan hanya roda dua saja. 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan sudah bagus, dapat dilewati roda dua dan roda empat.
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas seadanya, masih dalam proses pengembangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tahun ke tahun segala fasilitas mulai bermunculan.
<ul style="list-style-type: none"> Tempat parkir belum ada, motor dapat masuk ke area bambu, jalan menyusuri bambu masih berbentuk tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kolam renang, jalan menyusuri bambu sudah beton, adanya panggung, tempat parkir yang luas, kantin, toilet, papan informasi, dan gazebo.

Sumber : Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru, 2020

Adanya peningkatan fasilitas setiap tahunnya, jumlah pengunjung yang mendatangi desa wisata ini juga meningkat. Menurut hasil observasi dengan wakil ketua POKDARWIS Bapak Agus Wijaya, beliau menjelaskan bahwa adanya peningkatan jumlah pengunjung dari tahun 2014-2019 dengan harga tiket masuk Rp 5.000. Peningkatan tersebut telah dirangkum pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Data Pengunjung dan Penghasilan Wisata Alam Hutan Bambu

2015	2016	2017	2018	2019
50 ribu	55 ribu	58 ribu	63 ribu	70 ribu
Rp 250.000.000	Rp 275.000.000	Rp 290.000.000	Rp 315.000.000	Rp 350.000.000

Sumber : Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru, 2020

Sesuai penjelasan di atas, perlu disadari bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan wewenang kepada Desa Sumber Mujur untuk mengelola, dan hal ini melalui kelompok sadar wisata “Sabuk Semeru” sebagai penggerak utama desa wisata Hutan Bambu telah memberikan langkah-langkah dan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada dalam proses pengelolaan wisata di desa Sumber Mujur. Adanya ide yang kreatif dan inovatif dari kelompok tersebut seperti hasil olahan bambu, maupun konsep penataan ruang yang tepat sehingga dapat menghasilkan sebuah wisata unik yang menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar

ataupun masyarakat luar daerah. Kelompok sadar wisata pada dasarnya memiliki prinsip adanya proses pengelolaan. Proses pengelolaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan/pelaksana, pengawasan dan pemanfaatan hasil dengan terciptanya kesadaran masyarakat serta terwujudnya Sapta Pesona. Dari penjelasan latar belakang di atas yang diperoleh dari hasil penelitian sementara dilapangan, maka dari itu muncul suatu ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan/mencari solusi atas masalah yang timbul. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu dipahami apa sebenarnya masalah itu. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu perasaan keingintahuan, kegundahan dan kebingungan yang timbul akibat adanya ketidakjelasan atas suatu fenomena yang terjadi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah itu terjadi sekaligus menimbulkan keingintahuan terkait solusi bagi penyelesaian masalah tersebut. Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena.

Pengertian mengenai masalah di atas dan dipadukan dengan latar belakang yang dibangun guna mengadakan penelitian ini menuntun untuk dapat merumuskan permasalahan “Bagaimana pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang pada tahun 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atau jawaban atas rumusan penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan penelitian di atas. Peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya yaitu “Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berbasis kelompok sadar wisata di desa Sumber Mujur kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang pada tahun 2020”.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Kata lainnya, manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Sedangkan, Wardiyanta (2006:90) mengemukakan bahwa manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Manfaat teoritis penelitian mengemukakan bahwa penelitian memiliki manfaat bagi pengembangan teori, sedangkan manfaat praktis penelitian menunjuk pada hasil penelitian akan berguna pada hal-hal yang bersifat praktis sesuai dengan bahasan penelitian.

Definisi-definisi mengenai manfaat penelitian di atas memberikan jalan bagi peneliti untuk merumuskan manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yang meliputi:

a. Bagi Akademik

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta acuan secara konseptual mengenai kajian konsep pengelolaan dan konsep pariwisata berbasis kelompok sadar wisata.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang proses kelompok sadar wisata dalam pengelolaan desa wisata.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangasih pemikiran bagi instansi pemerintah yang terkait dan memberikan masukan bagi pihak-pihak pengelola baik pemerintah maupun organisasi terkait.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini memuat beberapa teori yang menunjang dalam penelitian, diantaranya adalah: (1) administrasi publik; (2) *good governance*; (3) desentralisasi. (4) konsep pemerintah daerah, (5) konsep pengelolaan; (6) desa wisata; (7) *community based tourism* (CBT); (8) kerangka berpikir penelitian; dan (9) tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian jika tanpa konsep dasar tidak akan berjalan karena fungsi dari konsep dasar tersebut yaitu membangun kerangka berpikir dari peneliti. Silalahi (2012:112) mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dibangun atas karakter- karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kegiatan publik yang terkait dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berbasis kelompok sadar wisata di desa Sumber Mujur kabupaten Lumajang yang meliputi:

1. Administrasi Publik
2. *Good Governance*
3. Desentralisasi
4. Konsep Pemerintah Daerah
5. Konsep Pengelolaan
6. Desa Wisata
7. *Community Based Tourism* (CBT)
8. Kerangka Berpikir Penelitian
9. Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.1 Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik merupakan salah satu cabang dari ilmu administrasi. Ilmu administrasi ini mempelajari tentang bagaimana proses, kemudian kegiatan dan diikuti dengan dinamika kerja sama manusia. Kerja sama ini identik dengan publik, yang mana segala sesuatunya dikomunikasikan dengan

kalangan masyarakat umum. Kerja sama merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mendapatkan hasil.

Mufiz, A (2014:12) mengatakan bahwa administrasi publik adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber daya manusia dan alam, yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan. Pendapat lain mengenai pengertian administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai yang dikemukakan oleh (Y. Wayong, 2010). Berbagai pemikiran administrasi publik yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan mengenai teori, paradigma, model, dan bermacam-macam keterkaitannya dalam proses kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara praktis.

Terdapat beberapa model administrasi salah satunya yaitu model administrasi era pembangunan. Berbagai dimensi administrasi dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan di negara-negara berkembang secara sistemik berhubungan erat satu sama lain, dan dapat disederhanakan dalam komponen-komponen permasalahan administrasi sebagai berikut: kelembagaan, organisasi, sumber daya manusia, manajemen serta sarana dan prasarana administrasi (Mustopadidjaja, 2002:4). Apabila dihubungkan dengan inti dari ilmu administrasi publik ketika pertama kali dikembangkan oleh Woodrow Wilson bahwa tujuan utama eksistensinya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat pada umumnya, maka tampaknya diperlukan paradigma-paradigma baru yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan administrasi di negara-negara berkembang dan berorientasi pada administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Paradigma-paradigma baru tersebut munculnya setelah berakhirnya era paradigma Henry pada tahun 1970, dan bebarengan dengan Era Pembangunan yang dicanangkan oleh United Nation Organization (Thoha, 2002:5).

Adanya pergeseran paradigma tersebut menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat madani sehingga perlu dikembangkan pandangan atau paradigma baru

administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2 *Good Governance*

Menurut Sumarto (2009:15) *Good Governance* adalah mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga yang mengatur sumber daya dalam memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. *Governance* yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Duadji (2013:9) menyebutkan bahwa *Good Governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dalam konteks *Good Governance* agen tidak hanya pemerintah saja, tetapi masyarakat dan terutama sektor usaha atau swasta yang berperan dalam *governance*.

Good Governance merupakan suatu paradigma baru yang berorientasi kepada hubungan yang sinergik dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. UNDP merumuskan 9 karakteristik *Good Governance*. Kesembilan karakteristik tersebut adalah (1) *Participation*, (2) *Rule of Law*, (3) *Transparency*, (4) *Responsiveness*, (5) *Consensus Orientation*, (6) *Equity*, (7) *Effectiveness and Efficiency*, (8) *Accountability*, dan (9) *Strategic Vision*. Menurut konsep ini, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, pemerintah harus memberi kesempatan kepada setiap warganegara untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam pembuatan keputusan. Kerangka hukum negara pun harus adil dan diberlakukan kepada setiap warganegara, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di samping itu, setiap informasi yang berhubungan dengan praktek pemerintahan harus dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, dipahami dan dapat dimonitor. Pemerintah pun harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan melaksanakan pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk mencapai hasil yang terbaik, kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan kesepakatan bersama di

antara pemerintah dan stakeholders. Kebijakan juga harus diberlakukan sama kepada semua warganegara, karena mereka memiliki hak yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan.

Good Governance seolah menjadi penguasa terhadap berbagai penyelesaian yang dihadapi di Indonesia. Pada tingkat nasional, banyak sekali suara terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat yang meneriakkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan *fairness* yang tidak lain adalah prinsip pelaksanaan *good governance*. Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004, telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistis. Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Semangat desentralisasi yang utama adalah pemutusan rantai birokrasi pengambilan keputusan agar terjadi peningkatan kualitas pada pelayanan publik. Sementara itu di lain pihak, secara administrasi, telah terjadi aliran dana dari pemerintah pusat ke Pemda dalam jumlah besar untuk menjadikan otonomi daerah berjalan. Bersamaan dengan semakin besarnya fungsi desentralisasi tersebut maka kewenangan pengelolaan keuangan pun makin besar. Disinilah kemudian Pemda memiliki kewenangan untuk mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya pajak dan sejumlah retribusi daerah yang dapat dikoleksi oleh Pemda adalah penyumbang terhadap jumlah PAD ini.

Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Melalui proses ini maka desentralisasi diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan

daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa pengalaman empirik memang telah membuktikan bahwa desentralisasi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya Good Governance.

2.3 Desentralisasi

Desentralisasi merupakan salah satu sistem pembagian kekuasaan dimana sering digunakan sebagai cara dalam mengatur pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Desentralisasi sangat cocok diterapkan di negara kita yakni Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau serta wilayah yang luas sehingga perlu adanya pembagian secara merata mengenai kekuasaan untuk mengatur daerahnya.

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu de adalah lepas dan centrum adalah pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Menurut ketentuan dalam desentralisasi sendiri, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mempunyai makna adanya pelimpahan kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam desentralisasi harus ada pembagian wewenang atau kekuasaan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah akan bersifat otonomi sedangkan dalam mengelola urusan, daerah dapat menentukan dengan caranya sendiri.

Pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk kelancaran urusan pemerintahan dan pelimpahan ini dapat berupa asas desentralisasi. Berdasarkan sistem tata pemerintahan menurut UUD 1945, asas dasar desentralisasi merupakan pemberian kebebasan untuk membangkitkan kekuatan rakyat yang melalui wakil-wakil di dalam badan perwakilan daerah. Asas desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas pada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya (Aziz dan Hidayat, 2016).

2.4 Konsep Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan awalan "pe" menjadi kata "pemerintahan" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Sedangkan akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas wilayahnya. Menurut Rasyid (2000:15), peran pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, sebagaimana penyerahan wewenang untuk daerah yang disebut otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengurus daerahnya secara mandiri namun tetap berada dalam pengawasan dan tujuan nasional.

2.4.1 Otonomi

Menurut UU No. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa, seharusnya Pemerintah memberikan kontribusinya dalam tujuannya membangun daerahnya terutama pihak Pemerintah Desa. Dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat (Widjaja, 2005). Terdapat beberapa macam otonomi, otonomi yang dimaksud yaitu otonomi daerah dan otonomi desa.

1. Otonomi Daerah

Penetapan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Selain itu tampak adanya upaya dari pemerintah untuk menyelenggarakan reformasi yang lebih memperhatikan daerah. Perwujudan *good governance* yang diterjemahkan dalam desentralisasi yang telah dilaksanakan pemerintah republik Indonesia muncul karena dua alasan. Pertama, masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah sebagai akibat dari pola sistem pemerintahan masa lalu yang sentralistik. Kedua, desentralisasi sebagai jawaban dalam menjawab era baru dengan peraturan baru (Mardiasmo, 2002).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2001). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa:

“otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya

saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya jadi pada organisasi/administrative lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

2. Otonomi Desa

Desa juga memiliki otonomi tersendiri untuk mengelola pemerintahannya, sebagaimana telah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dan memiliki kewenangan yang diakui dalam pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten desa menurut H,A,W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).”

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut tujuannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

2.4.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Diterapkannya otonomi daerah sehingga memberi kewenangan bagi daerah untuk mengurus daerah masing-masing. Pemerintah tiap daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur bagaimana daerahnya, melakukan pembangunan sesuai potensi yang ada di daerah dan sesuai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Pemerintah memiliki urusan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu urusan pemerintah absolut dan konkuren. Urusan absolut merupakan kewenangan milik pusat sedang konkuren mengatur urusan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat (3), Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;

Pariwisata termasuk salah satu urusan pemerintahan pilihan sesuai yang telah dipaparkan di atas. Pemerintah daerah memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa supaya mengelola potensi yang ada di daerahnya.

2.5 Konsep Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pengelolaan memiliki pengertian yaitu sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”. Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang berarti kegiatan yang tersusun secara sistematis. Pengertian pengelolaan menurut teori George. R. Terry (2009:9) adalah sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik itu ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan pengelolaan merupakan aktifitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk merencanakan, mengatur, menata atau merapikan dengan hasil tujuan yang diinginkan.

Tujuan harus seimbang dengan usaha yang dilakukan, sehingga antara tujuan dan usaha tidak ada kata sia-sia untuk meraihnya. Guna mencapai tujuan pengelolaan khususnya dalam bidang pariwisata yang berkelanjutan dengan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi maka pengelola wajib melakukan manajemen sumberdaya yang efektif. Manajemen sumberdaya ini tujuannya untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem yakni ekosistem Hutan Bambu dan degradasi kualitas lingkungan. Untuk menentukan serta agar tercapainya sasaran yang telah ditetapkan maka dibutuhkan manajemen pengelolaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Manajemen pengelolaan yang dimaksud sebagai berikut.

1. Perencanaan

Pengertian perencanaan menurut teori George. R. Terry (Hasibuan, 2006: 92) perencanaan merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut teori George R. Terry dalam Hasibuan (2006: 119) merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Penyelenggaraan/Pelaksanaan

Menurut teori G.R Terry dalam Hasibuan (2006:183) merupakan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengann perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan

Menurut teori G.R Terry dalam Hasibuan (2006: 242) pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Mengingat bahwa pengelolaan erat kaitannya dengan potensi wisata, sehingga dibutuhkan terciptanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Sapta Pesona. POKDARWIS merupakan organisasi atau lembaga di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan. Sedangkan yang dimaksud dengan Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik wisatawan yang akan berkunjung ke suatu daerah atau kawasan suatu obyek wisata tersebut.

Sapta pesona terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu : aman, bersih, tertib, sejuk, indah, ramah-tamah dan kenangan. Di bawah merupakan keterangan dari masing-masing unsur:

1. Aman

Pengertian Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu destinasi wisata apabila merasa aman, tentram tidak takut, terlindungi dan bebas dari tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya, gangguan oleh masyarakat dan terorisme. Aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik termasuk barang milik wisatawan.

2. Tertib

Pengertian kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata/daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

3. Bersih

Pengertian kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran lingkungan. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat, penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih, pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi dan sehat.

4. Sejuk

Pengertian kondisi lingkungan yang sejuk dan teduh yang dikehendaki oleh setiap orang, selain lingkungan yang serba hijau, segar dan rapi, juga harus didapat di dalam ruangan atau bangunan seperti usaha akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, usaha di kawasan wisata.

5. Indah

Pengertian suatu kondisi dimana keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang, bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan terbatas, sehingga memberi kesan yang menarik untuk wisatawan.

6. Ramah tamah

Pengertian suatu kondisi yang mencerminkan sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan santun, suka membantu, tersenyum dan menarik hati wisatawan.

7. Kenangan

Pengertian kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan yang indah dan menyenangkan selama berwisata, membuat wisatawan ingin berkunjung kembali serta memberitahukannya kepada keluarga, teman untuk berwisata kembali ke tempat yang telah dikunjungi.

2.6 Desa Wisata

Program desa wisata yang telah di canangkan pemerintah diharapkan dapat memajukan sektor kepariwisataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menambah pendapatan asli daerah melalui desa wisata. Demi terwujudnya program tersebut sangat dibutuhkan dukung oleh masyarakat, namun masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya keterlibatan keseluruhan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kepariwisataan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumber Mujur kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang. Belum maksimalnya infrastruktur yang ada di kawasan desa wisata Hutan Bambu Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang mendorong pemerintah mengambil langkah untuk mnciptakan suatu organisasi agar pengelolaan desa wisata lancar. Belum adanya keterlibatan dengan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program – program pemerintah dan juga investor terutama dalam pengelolaan kepariwisatan secara langsung yang

juga menjadi bukti belum maksimalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan kepariwisataan.

Peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 4 bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya serta memperkenalkan budaya. Adanya kepedulian bersama antara pemerintah serta pihak yang terkait dalam mengembangkan desa wisata dirasa akan mampu merangsang perekonomian masyarakat. Kepedulian pemerintah dengan kebijakan yang proaktif terhadap desa wisata diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat pedesaan.

2.6.1 Pengertian Desa Wisata

Menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Satu Desa Satu Wisata pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa:

“Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomiannya yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.”

Pengelolaan desa wisata sangat perlu untuk di realisasikan, bentuk pengelolaan desa wisata pada dasarnya adalah milik masyarakat yang dikelola secara baik dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan seperti; (1) aspek sumber daya manusia, (2) aspek keuangan, (3) aspek material, (4) aspek pengelolaan dan (4) aspek pasar (Peraturan Bupati Lumajang, 2014).

2.6.2 Tujuan dan Kriteria Pembentukan Desa Wisata;

Sebelum dibentuknya sebuah desa wisata pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan hal-hal yang dijadikan persyaratan. Ada beberapa tujuan, diantaranya;

1. mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata;
2. mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk desa wisata setempat;
3. meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan sumber ekonomi;

Kriteria dan persyaratan desa wisata meliputi;

1. tersedianya akses yang baik, sehingga wisatawan lebih mudah berkunjung dengan berbagai jenis alat transportasi;
2. memiliki obyek-obyek wisata yang menarik diantaranya berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai kesatuan suatu obyek wisata.
3. masyarakat beserta aparat desa bersedia memberikan dukungan yang sepenuhnya terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya;
4. harus memenuhi unsur-unsur sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan ketenangan);
5. tersedianya sarana dan prasarana (transportasi, SDM, homestay, dan bangunan fasilitas penunjang) yang memadai;
6. obyeknya masih asli dan asri;
7. berhubungan dengan obyek wisata yang lain sehingga mudah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sesuai dengan persyaratan yang telah terpapar diharapkan setiap daerah ataupun kecamatan wajib memperhatikan persyaratan tersebut. Alasannya karena jika ada satu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka desa wisata tidak akan berjalan dengan sempurna.

2.7 *Community Based Tourism (CBT)*

Menurut Prasiasa (2011:95) pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) merupakan sebuah pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang sangat berbeda dengan pendekatan konvensional yang selama ini dijalankan. Sedangkan menurut Hausler (dalam Sunaryo, 2013) kepariwisataan berbasis masyarakat pada hakekatnya merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak, dalam bentuk pemberian akses pada manajemen dan sistem pembangunan yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan kepariwisataan secara lebih adil bagi masyarakat lokal.

2.7.1 Kelompok Sadar Wisata

1. Pengertian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya Pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan daerah wisatanya. Sehingga bukan hanya Pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri.

2. Maksud dan Tujuan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Maksud dari pembentukan Pokdarwis yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran

akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- b. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

3. Fungsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah:

- a. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
- b. Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

4. Kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Lingkup kegiatan pokdarwis yang dimaksud disini adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
- b. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.

- c. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
- e. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
- f. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

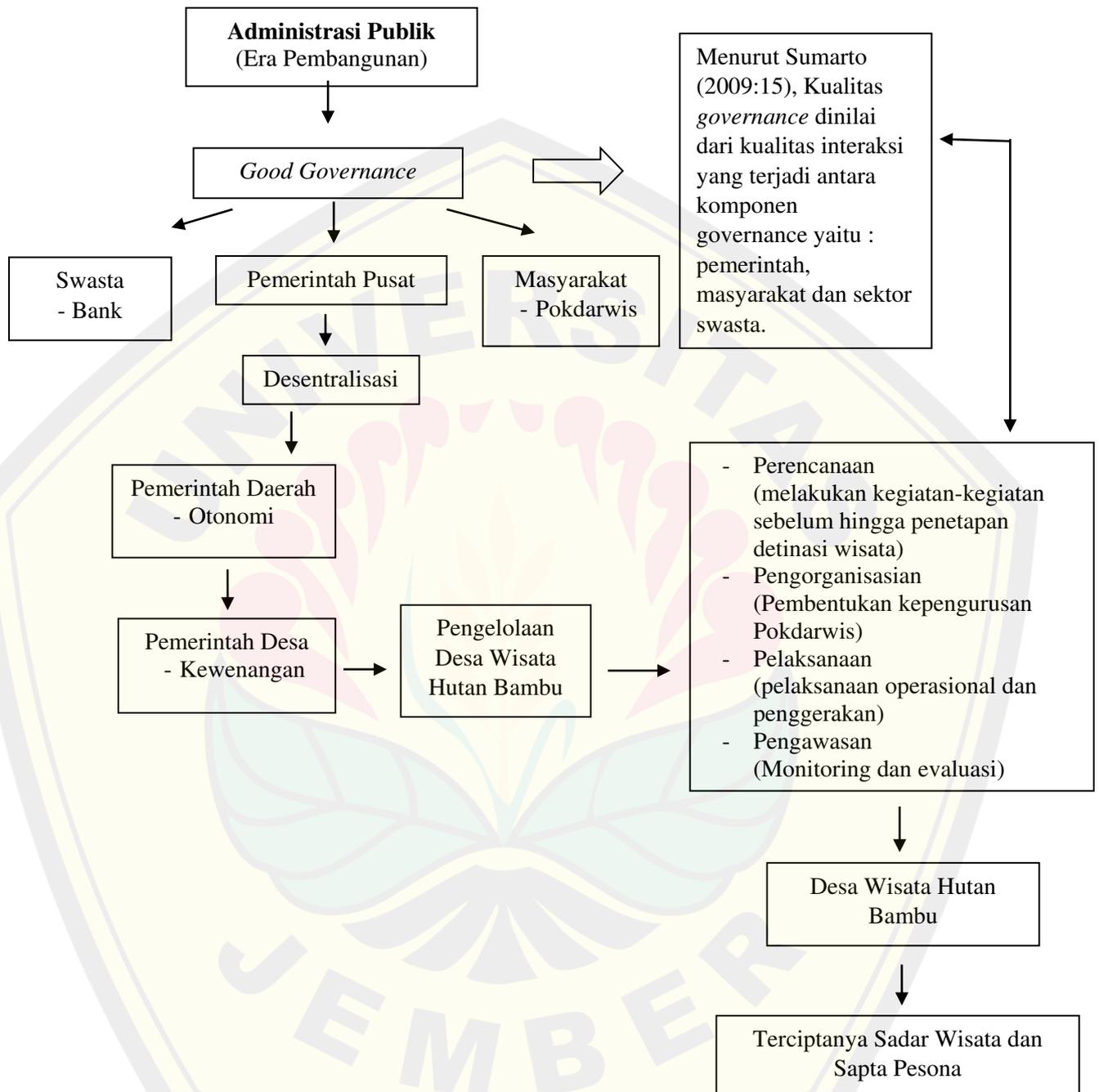
Kegiatan Pokdarwis meliputi pengembangan dan pelaksanaan guna meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepariwisataan, meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan dalam mengelola sebuah usaha, mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat, dan juga memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Adanya beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata berbasis masyarakat (CBT) merupakan pengelolaan kepariwisataan yang didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat diawali dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan sampai pada pemanfaatan hasil kepariwisataan. Masyarakat dapat dirangkul untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan dengan cara pemerintah membentuk suatu kelompok yang bertugas untuk mengelola melalui ide kreatif serta inovatif yang disebut dengan kelompok sadar wisata. Pada desa wisata Hutan Bambu, telah dibentuk kelompok sadar wisata yang diberi nama kelompok sadar wisata “Sabuk Semeru”.

2.8 Kerangka Berpikir

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang bahwa desa wisata hutan bambu sangat menunjang lapangan pekerjaan serta perekonomian masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dengan masyarakat maupun lembaga swasta yang berusaha untuk mengelola desa wisata agar menjadi pusat perhatian masyarakat. Dibuktikan dengan dibentuknya “POKDARWIS” sebagai penggerak kesadaran masyarakat akan potensi alam yang dimiliki oleh desa ini, sehingga muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan desa wisata hutan bambu berbasis kelompok sadar wisata yang mana dapat dikatakan berhasil karena setiap tahunnya pengunjung yang berdatangan di desa wisata ini selalu meningkat.

Kerangka berpikir yang lebih jelas pada pengelolaan desa wisata hutan bambu berbasis Kelompok sadar wisata dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryawan (2016) melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini dengan judul “Peran Kelompok Sadar Wisata Sendang Arum dalam Pengembangan Potensi Pariwisata”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa Kelompok Sadar Wisata memiliki peran penting terhadap pengembangan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut. Diawali dengan memperkenalkan kemudian sampai tahap bekerja sama. Pengelolaan juga termasuk di dalam penelitian ini, akan tetapi lebih ditegaskan oleh peranan dari kelompok sadar wisatanya”.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2017) dengan judul “Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat” dengan hasil penelitian sebagai berikut.

Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sudah sesuai dengan tahap-tahap pengelolaan yakni diawali dengan perencanaan kemudian diikuti oleh organisasi yang kebetulan dibentuk anggota dan dibantu oleh masyarakat sampai dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat, meninjau pengelolaannya sudah terstruktur dengan baik sesuai langkah-langkah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak dari masalah yang diangkat, penelitian yang dilakukan Ramadhani dilatar belakangi oleh penurunan dalam pengelolaan yang berbanding terbalik dengan penelitian yang akan dilakukan”.

Persamaan dari kedua penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif terlihat dari penggambaran hasilnya, sedangkan adapun perbedaannya yakni pertama, dalam hal tempat penelitian. Kedua yaitu pembahasan, penelitian pertama membahas tentang peran suatu kelompok dalam pengembangan pariwisata kemudian penelitian kedua mengenai pengelolaan berbasis masyarakat, perbedaan yang ketiga mengenai teori yang digunakan kedua penelitian tersebut jelas berbeda.

Adanya penelitian-penelitian terdahulu yang relevan seperti yang telah disebutkan di atas, maka dilakukanlah penelitian deskriptif untuk menghasilkan sebuah penjelasan dan gambaran mengenai pengelolaan yang berjalan di wisata tersebut. Pengelolaan oleh kelompok sadar wisata diharapkan dapat memberikan dampak

yang baik bagi masyarakat sekitar sehingga desa wisata yang telah dibangun akan terpelihara dan terorganisir dengan tepat. Pemerintah pun akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap desa yang telah diberikan wewenang untuk memelihara desa wisata tersebut.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Sugiyono (2015:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada bab ini akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian di antaranya yakni: (1) pendekatan penelitian; (2) tempat dan waktu penelitian; (3) sumber data dan data; (4) penentuan informan penelitian; (5) teknik dan alat pengumpulan data; (6) teknik menguji keabsahan data; dan (7) teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Diharapkan dapat mendeskripsikan lebih rinci terutama pelaksanaan kegiatan kelompok sadar wisata yang dilakukan sebagai upaya dalam pengelolaan desa wisata. Menurut Usman dan Akbar (2009:4), penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, 2007:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan serta pengelolaan desa wisata yang akan diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang telah dikemukakan oleh Silalahi (2012:38) bahwa pendekatan kualitatif memiliki kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang” ini dilaksanakan di objek desa wisata Hutan Bambu di Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Waktu penelitian merupakan kurun waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian. Waktu penelitian dilakukan hanya satu bulan mulai dari 22 September–31 Oktober 2020.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial. Situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiono (2009:390), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Berdasarkan pengertian diatas, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis sebagai berikut.

a. Tempat (*Place*)

Penelitian ini dilakukan pada objek pariwisata hutan bambu desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

b. Pelaku (*Actor*)

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian

kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Penelitian ini melibatkan informan yaitu :

- a. Devisi pengelolaan dan pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Kepala Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro
- c. Ketua Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru Sumbermujur Kecamatan Candipuro
- d. Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru Sumbermujur Kecamatan Candipuro
- e. Anggota Kelompok Sadar Wisata
- f. Masyarakat sekitar lokasi pariwisata

3. Aktifitas (*Activity*)

Aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut;

- a. Melakukan pembinaan dan pelatihan Kelompok Sadar Wisata
- b. Melakukan pendampingan wisatawan
- c. Melakukan penjagaan tiket masuk, parkir, dan pemeliharaan area
- d. Melakukan Pengawasan terhadap area wisata dan Desa

3.4 Desain Penelitian

Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2015:8) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan dari proses pengamatan. Pada penelitian kualitatif bentuk desain penelitian dimungkinkan sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat emergent dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa yang adanya sesuai dengan yang

dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Moloeng (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian. Arikunto (dalam Prastowo, 2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variable, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

1.4.1 Sumber Data dan Data

Menurut Suharsimi (2012:16) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data Primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contoh data primer antara lain; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan dokumentasi dilakukan pada kegiatan pengelolaan desa wisata Hutan Bambu, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu. Berikut merupakan beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian ini.

- a. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa

- Gambaran umum Desa Sumbermujur
- Potensi yang ada di Desa Sumbermujur
- Dibentuknya desa wisata di Desa Sumbermujur
- Siapa saja yang mengelola dan terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu

- Kerjasama dalam mengelola Desa Wisata Hutan Bambu
 - Peran masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan
 - Bentuk pengawasan yang dilakukan
- b. Informasi yang diperoleh dari Bidang Pariwisata
- Gambaran umum pariwisata di Kabupaten Lumajang
 - Proses agenda hingga menjadi destinasi wisata di Desa Sumbermujur
 - Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Desa Wisata Hutan Bambu
 - Peran dan keterlibatan Disparpora Kabupaten Lumajang
 - Bentuk promosi yang dilakukan
 - Disparpora Kabupaten Lumajang
- c. Informasi yang diperoleh dari Kelompok Sadar Wisata
- Gagasan atau ide awal dibentuknya Desa Wisata Hutan Bambu
 - Proses pembentukan organisasi pengelola
 - Fasilitas sarana dan prasarana yang ada
 - Kontribusi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan
 - Kerjasama yang dilakukan dalam mengelola Desa Wisata Hutan Bambu
 - Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pengelola
- d. Informasi yang diperoleh dari masyarakat (pengisi warung)
- Pengaruh adanya Desa Wisata Hutan Bambu terhadap kehidupan masyarakat
 - Pemanfaatan hasil yang diterima dengan adanya Desa Wisata Hutan Bambu
 - Keikutsertaan masyarakat dalam mengelola Desa Wisata Hutan Bambu
- e. Informasi yang diperoleh dari pengunjung Desa Wisata
- Pelayanan yang diberikan pihak pengelola
 - Sarana dan prasarana yang ada di Hutan Bambu
 - Kesan pesan yang didapatkan saat berjualan di area Desa Wisata

Hutan Bambu

2. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. seperti halnya majalah dan dokumen-dokumen lainnya pada saat pengamatan. Data ini dapat berupa dokumen, catatan, laporan, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang meliputi data kunjungan tahun 2017-2018, SK Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata, kemudian foto-foto terkait wawancara dan pengelolaan desa wisata Hutan Bambu.

Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) data adalah himpunan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari sumber data. Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.
2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kualitatif karena tidak melibatkan angka sama sekali melainkan menjelaskan bagaimana pengelolaan desa wisata Hutan Bambu yang dikelola oleh pokdarwis desa Sumber Mujur sehingga mengundang minat pengunjung untuk datang kesana.

1.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrumen utama penelitian. Informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar kondisi penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap setelah mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat (Moleong, 2010). Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang yang memiliki waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *Snowball Sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *Snowball Sampling* merupakan prosedur pemilihan informan secara bertahap. Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *Key Informant* yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, maka perlu adanya penentuan sejumlah kunci informan penelitian yang dinilai peneliti telah memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait topik penelitian Pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Sumber Mujur, diantaranya;

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

Informan	Jabatan	Keterangan
Bapak Safi'i (<i>Key Informant</i>)	Kepala Desa Sumbermujur	Sebagai informan penasehat serta penyediaan dalam segala hal mengenai destinasi wisata di desa wisata Hutan Bambu desa Sumbermujur
Bapak Agus Wijaya	Wakil Ketua Pokdarwis "Sabuk Semeru"	Sebagai informan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur
Bapak Eko Supriyanto	Sekretaris Pokdarwis "Sabuk Semeru"	Sebagai informan dalam perlengkapan dokumentasi yang berhubungan dengan desa wisata
Ibu Yayuk Sri	Seksi Humas dan pengembangan SDM Pokdarwis "Sabuk Semeru"	Sebagai informan penyerap aspirasi masyarakat dalam mengelola desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur
Bapak Lukmanul Hakim	Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan Pokdarwis "Sabuk Semeru"	Sebagai informan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu terkait promosi dan kerajinan
- Ibu Julaiha - Ibu Nur - Bapak Asnawi	Masyarakat desa Sumbermujur kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang	Sebagai informan pengelolaan pariwisata kampung kerapu terkait tiket masuk dan tiket parkir
Bapak Cipto Adi	devisi Pengelolaan dan Pengembangan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten	Sebagai informan pembinaan serta penyediaan dalam segala hal mengenai destinasi

Informan	Jabatan	Keterangan
	Lumajang	wisata di desa wisata Hutan Bambu desa Sumbermujur
Ibu Anggun	Pengunjung	Sebagai informan dalam kemajuan desa wisata Hutan Bambu

1.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hak utama untuk mempengaruhi kualitas data penelitian. Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, draft wawancara, alat elektronik. Tujuan daripada teknik dan alat pengumpulan data adalah untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, yakni;

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:70) observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, atau perilaku. Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan berguna untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipasi. Pengertian observasi nonpartisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik

observasi yang observer tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Tujuan lain agar peneliti memahami secara mendalam tentang lokasi desa wisata Hutan Bambu Sumbermujur dan mengenal subyek penelitian dengan baik. Melalui observasi peneliti akan lebih mudah masuk ke dalam dunia subyek yang diteliti, karena untuk memperoleh kepercayaan dari subyek yang diteliti, peneliti harus mempunyai akses dan dapat membangun koneksi dengan masyarakat setempat, sehingga peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan serta harapan peneliti dapat tercapai.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Supaya wawancara efektif, maka terdapat berupa tahapan yang harus dilalui, yakni: 1) mengenalkan diri; 2) menjelaskan maksud kedatangan; 3) menjelaskan materi wawancara; dan 4) mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010). Sugiyono (2011:233) membagi wawancara dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur;
- b. Wawancara semistruktur;
- c. Wawancara tidak terstruktur.

Berdasarkan tiga kategori di atas, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara terstruktur dapat melakukan

proses tanya jawab dengan cara menyiapkan dan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan dan ditujukan kepada informan, untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam sebelum melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dengan para informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Peneliti tidak cukup sekali dalam melakukan wawancara dengan informan, melainkan berkali-kali. Hal ini dilakukan karena setelah mengolah data hasil wawancara ternyata mengalami pengembangan terhadap pokok-pokok pembahasan, maka dari itu peneliti mendatangi kembali informan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan peneliti dan melakukan wawancara kembali. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang hingga dirasa cukup oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:329) menyebutkan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang didapatkan di lapangan. Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69), merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dokumen dapat diperoleh melalui buku-buku yang ada di perpustakaan baik di lingkup pendidikan maupun daerah. Dokumen didapat dengan cara kita membaca secara teliti apa yang diinfokan didalamnya dan membaca rujukan-rujukan atau referensi.

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi Perbup tentang Satu Desa Satu Wisata, Perdes tentang desa wisata, SK Kepengurusan Pokdarwis, foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan pengelolaan desa wisata.

Definisi dan keterangan mengenai alat pengumpulan data telah disebutkan ada 3, yakni;

1. Alat Perekam

Alat perekam ialah salah satu media yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Alat perekam terdapat bermacam-macam jenis, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan audio maupun visual. Melalui media ini kita bisa merekam audio atau membuat video, mengulanginya dan juga menghapusnya. Selain itu juga pita rekaman bisa diputas berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume, sehingga bisa menimbulkan berbagai kegiatan diskusi.

2. Draft Wawancara

Draft merupakan rancangan atau konsep, jadi dapat diartikan draft wawancara merupakan suatu rancangan ataupun konsep mengenai hal-hal apa saja yang perlu dijadikan bahan pembicaraan dalam wawancara. Wawancara jika disusun terlebih dahulu akan memberikan informasi yang jelas tidak lebih dari ranah yang dituju.

3. Alat Elektronik

Alat elektronik merupakan pelengkap, bisa berupa *handphone* atau kamera jika dibutuhkan. Alat ini sangat berguna untuk memperjelas informasi yang didapat baik dalam hal dokumentasi ataupun lainnya.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisah dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moeloeng (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Teknik pemeriksaan ini terdapat empat kriteria dan sepuluh pemeriksaan, sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kreadibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangn keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber; Moeloeng (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik yang dipaparkan pada tabel di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

1. Ketekunan Pengamatan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, menuntut peran untuk terjun langsung ke lokasi penelitian. Peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri jika dalam ranah penelitian kualitatif, sehingga dituntut untuk memiliki sifat yang tekun dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh serta analisisnya. Menurut Moeloeng (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol kemudian dianalisis secara rinci sehingga memahami hasil yang didapatkan. Peneliti melakukan pengamatan terkait pengelolaan di dalam lokasi wisata dan pengamatan dilakukan secara spontan serta tidak terjadwal.

Peneliti melakukan ketekunan pengamatan dengan melaksanakan beberapa hal diantaranya; meneliti kebenaran dokumen yang didapatkan, meneliti data yang didapatkan baik dari hasil wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi, selanjutnya mencatat dan mengumpulkan dengan sedetail-detailnya.

2. Triangulasi

Menurut Moeloeng (2014:332), dengan triangulasi peneliti dapat *me-rechek* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode,

atau teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moeloeng (2014:332) sebagai berikut ini;

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh, seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri dan orang lain. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman (2014), mengemukakan bahwa menganalisis data dengan tiga langkah yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*. Komponen-komponen analisis data dan model interaktif dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Semakin lama di lapangan semakin banyak pula jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi lainnya.

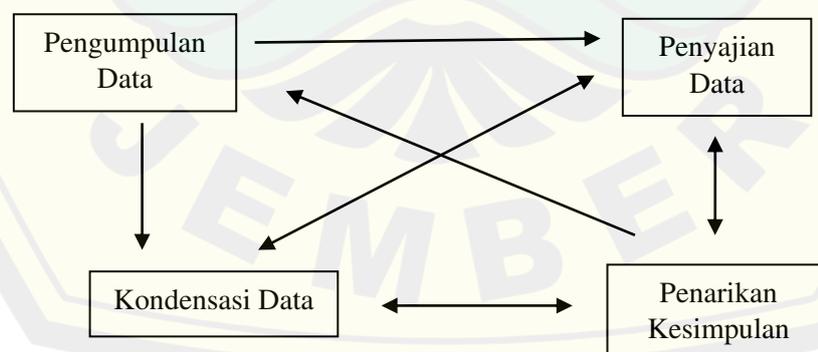
3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2017:137) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian data setelah data direduksi dan dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. *Mendisplay* data sangat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusions Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang dapat dipercaya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi bisa saja tidak.

Skemanya tertera pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Skema Analisis Penelitian

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini akan diuraikan tentang: (1) deskripsi lokasi penelitian; (2) pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur; dan (3) analisis hasil penelitian.

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian meliputi gambaran umum kabupaten Lumajang dan desa Sumbermujur. Deskripsi lokasi penelitian ini dianggap penting karena fungsinya sebagai sarana awal untuk mengenal lokasi penelitian. Oleh karena itu, sebelum membahas mengenai pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berbasis kelompok sadar wisata, alangkah baiknya untuk mengenal lebih jauh lokasi penelitian terlebih dahulu.

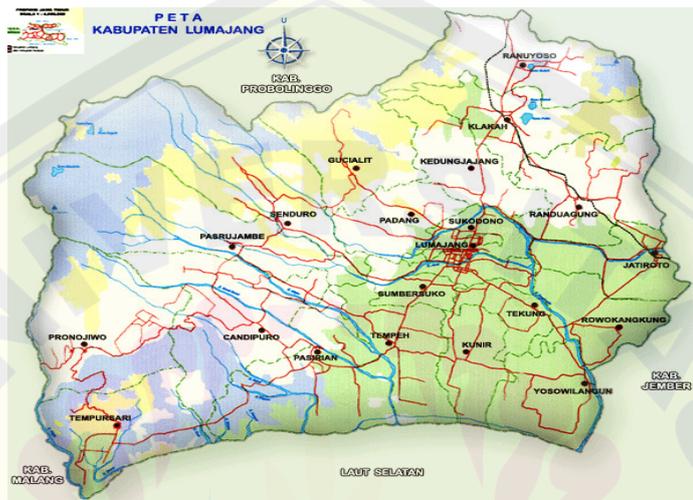
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur, di bagian barat, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo, terdapat rangkaian Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Semeru (3.676 m) dan Gunung Bromo (2.392 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung ini merupakan potensi andal Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lain berupa hasil material yang dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu, gunung ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara 112o 50'113o 22' Bujur Timur dan 7o 52'–8o 23' Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Summersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit,

Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso. Adapun batas – batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lumajang

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2018 sebesar 1.039.794 jiwa, yang terdiri dari 507.781 jiwa penduduk laki-laki dan 532.013 jiwa perempuan yang tersebar 21 kecamatan, 7 kelurahan, dan 198 desa. Berikut merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang:

Tabel 4.1 Kecamatan Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Kecamatan Tempursari	12	Kecamatan Jatiroto
2	Kecamatan Pronojiwo	13	Kecamatan Randuagung
3	Kecamatan Candipuro	14	Kecamatan Sukodono
4	Kecamatan Pasirian	15	Kecamatan Padang
5	Kecamatan Tempeh	16	Kecamatan Pasrujambe
6	Kecamatan Lumajang	17	Kecamatan Senduro
7	Kecamatan Sumbersuko	18	Kecamatan Gucialit
8	Kecamatan Tekung	19	Kecamatan Kedungjajang
9	Kecamatan Kunir	20	Kecamatan Klakah
10	Kecamatan Yosowilangun	21	Kecamatan Ranuyoso
11	Kecamatan Rowokangkung		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2019

Kabupaten Lumajang memiliki visi pembangunan yaitu sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, yaitu Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut.

1. Lumajang yang berdaya saing, adalah dengan kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
2. Lumajang yang makmur, bermakna bahwa kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.
3. Lumajang yang bermartabat, adalah kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan bermartabat,

Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Guna mendukung dan merealisasikan visi yang telah dibuat, ditetapkan juga misi kabupaten Lumajang sebagai berikut.

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata. Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman, perlindungan masyarakat dan sosial).
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*). Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi.

Objek pariwisata yang ada di kabupaten Lumajang tidak seluruhnya dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melainkan dikelola langsung oleh masyarakat yang terbentuk dalam Kelompok Sadar Wisata sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi yang ada di desa, sehingga nantinya akan menjadi industri pariwisata serta menerapkan prinsip-prinsip Sapta Pesona.

4.1.2 Gambaran Umum Desa Sumbermujur

Desa Sumbermujur merupakan desa yang terletak di kecamatan Candipuro, kabupaten Lumajang. Desa Sumbermujur dikenal kaya akan wisata alamnya karena desa ini berupa dataran tinggi dan memiliki panorama yang indah.



Gambar 4.2 Kantor Kepala Desa Sumbermujur

Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 400-500 m di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 574,7 Ha. Desa Sumbermujur terletak kurang lebih 30 km dari kabupaten Lumajang dan kurang lebih 7 km jarak dari kecamatan Candipuro. Berikut merupakan batas-batas administratif desa Sumbermujur;

Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Sumbermujur

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Pasrujambe	Kec. Candipuro
Sebelah Timur	Desa Penanggal	Kec. Candipuro
Sebelah Selatan	Desa Sumberwuluh	Kec. Candipuro
Sebelah Barat	Desa Supiturang	Kec. Candipuro

Sumber: kampungb.bkkbn.co.id

Terdapat 7 dusun di desa Sumbermujur, diantaranya yaitu dusun Krajan, dusun Umbulsari, dusun Kebonseket, dusun Umbulsari, dusun Wonorengo, dusun Banjarrejo, dan dusun Sidorejo.



Gambar 4.3 Ikon Desa Sumbermujur

Berdasarkan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2010 desa Sumbermujur kecamatan Candipuro menetapkan bahwa tanggal 1 Suro merupakan agenda rutin sedekah desa yang merupakan warisan dari para leluhur, salah satunya ada ritual pendem kepala sapi, arak-arakan hasil bumi polo pendem, polo gemantung yang diiringi kesenian reog dan kuda lumping yang diberangkatkan dari balaidesa menuju Hutan Bambu.

Desa wisata Hutan Bambu juga terdapat sanggar tari, musik tradisional sebagai tempat untuk melestarikan dan mnyalurkan bakat bagi generasi muda yang ada di desa Sumbermujur. Apabila ditarik ke belakang, untuk menumbuhkan cinta terhadap budaya lokal itu sangatlah sulit apalagi saat ini. Adapun selain kesenian, ada juga kerajinan yang dimana desa Sumbermujur memiliki pengrajin batik tradisional yang mana menjadi unggulan desa wisata Hutan Bambu ini.

Desa wisata Hutan Bambu Sumbermujur memiliki banyak jenis bambu yang bisa dijadikan edukasi kepada anak-anak, banyaknya jenis bambu tersebutlah yang menjadikan desa wisata menjadi destinasi unggulan. Tidak serta hanya berwisata namun juga menghadirkan sarana edukasi mengenai berbagai jenis-jenis bambu yang mana sekarang jenis-jenis bambu tersebut mulai langka dan jarang ada di Indonesia. Kenapa edukasi mengenai bambu harus ada? Karena bambu itu sendiri mempunyai banyak manfaat, bambu bisa dijadikan berbagai macam kerajinan, berupa berbagai peralatan rumah tangga, konstruksi, kesenian, maupun

kebudayaan. Seperti halnya di desa wisata Hutan Bambu ini, warga sekitar juga memanfaatkan bambu untuk dijadikan berbagai macam kreasi. Seperti gelas, asbak, cangkir maupun yang lainnya.

4.1.3 Profil Desa Wisata Hutan Bambu

Desa wisata Hutan Bambu terletak di desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Desa wisata Hutan Bambu memiliki area 14 Ha yang terletak di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.



Gambar 4.4 Desa Wisata Hutan Bambu

Hutan Bambu merupakan ikon kecamatan Candipuro baik dalam hal destinasi maupun dalam hal pertanian. Mengapa perlu melestarikan hutan ini, salah satunya untuk mengairi sawah yang terdiri dari tiga desa yakni desa Penanggal, desa Tambak Rejo, dan desa Kelapa Sawit. Air yang mengalir berasal dari sumber mata air Hutan Bambu. Pemerintah desa Sumbermujur selalu berusaha memberikan wejangan kepada masyarakat agar selalu berperilaku baik dan memberikan sesuatu kepada desa lain untuk mata pencaharian di bidang pertanian.

Sosialisasi di desa Sumbermujur ini sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, baik mengenai pertanian dan destinasi wisata yang dimiliki desa. Destinasi wisata alam Hutan Bambu telah disepakati oleh semua tokoh

masyarakat, baik dari tokoh agama, karang taruna, RT/RW dan lain sebagainya. Musyawarah ini dilakukan karena sebenarnya air dari hutan bambu ini digunakan untuk pertanian, selanjutnya pihak desa mengajukan kepada para tokoh masyarakat yang telah diundang untuk membuat destinasi yang mana larinya nanti ke taraf ekonomi. Setelah disepakati untuk dijadikan destinasi dengan persyaratan tidak lagi menebang pohon bambu, satwa flora dan fauna tidak diganggu agar tetap lestari.

Objek desa wisata ini sangat cocok untuk berlibur dengan keluarga, Hutan Bambu Sumbermujur ini terlihat sangat elok dan tidak ada kesan angker seperti jika anda mendengarnya. Area sekitarnya terasa sejuk sepanjang hari. Selama di dalam area, pengunjung tidak akan terkena sengatan sinar matahari, meski datang siang hari bolong yang panas. Sorotan matahari berkurang karena adanya daun-daun bambu yang rimbun. Setelah memasuki hutan bambu ini, seperti kita melewati sebuah terowongan raksasa. Sepanjang Hutan Bambu, terdapat ratusan kera-kera jinak. Wisatawan pun bisa berinteraksi seperti memberikan makanan. Tidak hanya itu, para pengunjung juga dapat melihat ribuan ekor kalong atau kelelawar yang bergelantungan di pohon-pohon bambu dan pohon sekitarnya.

Hal ini juga akan menarik jika dijadikan sebagai media pendidikan terhadap anak-anak. Lingkungan setempat yang masih alami ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, khususnya bagi mereka warga kota yang mengidamkan sebuah lingkungan alami tanpa polusi. Memasuki obyek wisata Hutan Bambu, pengunjung dipungut tiket masuk sebesar Rp 3.000/anak-anak dan Rp 5.000/orang dewasa, akan tetapi untuk warga desa Sumbermujur tidak dipungut tiket masuk alias gratis. Namun untuk biaya konservasi hutan bambu ini, pihak desa Sumbermujur hanya menarik iuran pedagang yang berjualan di sekitar obyek wisata tersebut.



Gambar 4.5 Tiket masuk wisata Hutan Bambu

4.2 Pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur

Pariwisata merupakan sektor yang menyumbangkan banyak pendapatan bagi pemerintah. Pengelolaan pariwisata yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yaitu dengan meningkatkan pendapatan dengan melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Hutan Bambu merupakan desa wisata yang berpotensi menjadi desa wisata unggulan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata di desa wisata Sumbermujur. Proses pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Hutan Bambu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pelaksanaan dan pengawasan.

Peneliti juga melakukan analisis tentang pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berbasis kelompok sadar wisata serta meneliti dengan cermat mengenai kegiatan pengelolaan tempat wisata tersebut. Analisis peneliti didasari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen selama melakukan penelitian.

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, langkah awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan adalah melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan juga bertujuan untuk melakukan kegiatan dan merumuskan program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Perencanaan sendiri

merupakan tahapan paling penting dan paling utama fungsi manajemen, terutama dalam pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu Sumbermujur Lumajang. Perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam manajemen pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu.

Menurut teori George. R. Terry (Hasibuan, 2006: 92) perencanaan merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Desa Sumbermujur ditetapkan sebagai desa wisata, karena di Kabupaten Lumajang sendiri masih belum ada destinasi wisata dengan potensi alam yang unik dan berbeda seperti desa wisata Hutan Bambu. Faktor lain adalah telah ditetapkan Peraturan Bupati Lumajang no.79 Tahun 2014 Tentang Destinasi wisata satu kecamatan satu desa wisata di kabupaten Lumajang.

Suatu daerah atau desa pastinya memiliki sebuah potensi yang nantinya sangat bisa dikembangkan atau dikelola sehingga menjadi nilai jual lebih untuk ke depannya, tergantung bagaimana cara desa memanfaatkan potensi tersebut. Desa Sumbermujur memiliki potensi alam dan panorama yang sangat menarik nan indah. Hal ini dapat dikatakan bahwa desa tersebut sudah menggambarkan adanya nilai-nilai Sapta Pesona, maka dari itu masyarakat mulai tersadar akan pentingnya peluang destinasi wisata yang dimiliki desa tersebut sangatlah besar. Pemerintah beserta masyarakat mulai bekerja sama untuk membangun sebuah destinasi wisata dan hal ini merujuk pada Peraturan Bupati Lumajang. Perencanaan dalam pengelolaan desa wisata berbasis kelompok sadar wisata sangat memperhatikan nilai-nilai Sapta Pesona dan kerja sama demi menjaga desa Sumbermujur agar dapat menghasilkan peluang yang baik untuk masyarakat sekitar baik dalam lingkup sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga masyarakat desa Sumbermujur memperoleh keuntungan dengan dibentuknya desa wisata tersebut. Perencanaan berawal dari dibuatnya dan dibentuknya proposal untuk persetujuan Dinas Kabupaten agar destinasi wisata yang akan terbentuk dapat segera diresmikan. Perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu adalah sebagai berikut.

1. Pengajuan proposal

Keberadaan suatu obyek wisata tidak serta langsung dapat dikelola oleh masyarakat setempat, akan tetapi obyek wisata di desa Sumbermujur ini mempunyai sejarah panjang, dari zaman belanda Hutan Bambu ini sudah dikelola dan pada zaman Jepang mengalami kerusakan. Bambu-bambu ditebang dan tidak ditanam kembali sehingga kebutuhan air dan sumber air di desa tersebut semakin berkurang. Kemudian warga desa berupaya dan bekerja sama untuk melestarikan kembali Hutan Bambu tersebut. Bapak Safi'i berkata "Dulu, ada namanya Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA), bambu-bambu terus ditanam sehingga cadangan air pelan-pelan meningkat." Maka dari itu, pelestarian tersebut perlu dijaga dan dikembangkan karena kelak juga bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar dari sisi ekonomi, sosial, maupun budayanya.

Hutan Bambu untuk ditetapkan menjadi salah satu tujuan wisata di kabupaten Lumajang, yang mana sudah terlihat jelas bahwa obyek ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik harus melakukan pengajuan proposal terlebih dahulu kepada Dinas Kebudayaan dan pariwisata sebagai regulator dari pemerintah. Masyarakat yang tergolong dalam komunitas atau kelompok yang sadar akan wisata beserta pemerintah desa Sumbermujur melakukan pengajuan proposal kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti yang telah disampaikan Bapak Agus Wijaya sebagai aktivis komunitas desa Sumbermujur pada saat wawancara:

"sebetulnya saya dibantu oleh teman-teman komunitas atau pemuda desa Sumbermujur dalam hal pengajuan proposal ini mas, sehingga peresmian destinasi wisata ini lekas dilakukan. Pengajuan proposal disepakati pada saat musyawarah sekitar 6-7 tahun yang lalu pada tahun 2014 saya lupa tanggalnya mas, nah pengajuan proposal ini telah diketahui oleh kepala desa, RT, RW, lingkungan, dan babinsa. 3 hari setelah pengajuan tersebut, saya yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk bertemu dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menangani pengelolaan wisata di kabupaten Lumajang." (Selasa, 15 September 2020, 11 WIB)

Bapak Cipto Adi sebagai devisi Pengelolaan dan Pengembangan juga mengatakan:

“suatu obyek wisata dapat dikelola dan dijadikan sebagai tempat tujuan wisata awalnya harus mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Memang benar adanya bahwa masyarakat desa Sumbermujur mengajukan proposal kepada pihak dinas dan waktu itu saya yang menangani karena berada di bidang saya sampai saat ini. kemudian kami melakukan survei lokasi dan ternyata di desa Sumbermujur sana memiliki potensi alam yang sangat menonjol dan menarik. Akhirnya saya bersama pihak dinas yang lain melakukan rapat dan hasil rapat menyetujui dan sepakat untuk melakukan peresmian pembukaan desa wisata di desa Sumbermujur tersebut.” (Senin, 21 September 2020, 09.00 WIB)

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan selanjutnya setelah tujuan didapatkan kemudian musyawarah bersama dan langkah selanjutnya dalam perencanaan pengelolaan desa wisata Hutan Bambu adalah pengajuan proposal kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lumajang agar potensi wisata yang ada di desa Sumbermujur segera diresmikan dengan tujuan untuk menjadi desa wisata serta menjadi tempat tujuan wisata bagi seluruh masyarakat. Pengajuan proposal telah disepakati oleh pemerintah desa, penggiat lingkungan, pihak keamanan dan pastinya masyarakat desa Sumbermujur khususnya di sekitar lokasi destinasi wisata. Proses persetujuan desa wisata Hutan Bambu untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata diantaranya melakukan survei potensi wisata apakah dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata atau tidak, kemudian setelah melakukan survei, dilakukan rapat keputusan oleh pihak kedinasan apakah potensi atau objek wisata tersebut bisa dijadikan sebagai destinasi pariwisata di kabupaten Lumajang.

2. Peresmian Hutan Bambu sebagai desa wisata di desa Sumbermujur kabupaten Lumajang

Suatu objek wisata tidak bisa secara langsung menjadi tempat tujuan wisata ataupun desa wisata di suatu daerah tertentu, tentunya harus memiliki potensi wisata yang mumpuni terlebih dahulu. Kegiatan peresmian ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah, maka dari itu masyarakat melakukan kegiatan peresmian bersama pemerintah desa. Kegiatan peresmian memiliki

tujuan agar destinasi wisata dapat dikenal oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas. Berikut hasil wawancara Bapak Agus Wijaya selaku aktivis komunitas:

“Suatu objek wisata tidak serta merta langsung dapat dikelola dan dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di kabupaten Lumajang. Tahap setelah proposal disetujui maka harus ada peresmian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata., kemudian pada tahun 2014 tepatnya setelah dikeluarkannya peraturan bupati tentang Satu Desa Satu Wisata, maka desa wisata Hutan Bambu diresmikan oleh pihak dinas kabupaten Lumajang yang kedepannya menjadi sebagai tujuan wisata dan di dalamnya dapat dikembangkan baik itu dalam segi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa tersebut. Peresmian ini dihadiri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditunjuk sebagai perwakilan, kemudian ada juga perangkat desa Sumbermujur, pemuda-pemuda, para aktivis sosial, babinsa, sesepuh, dan masyarakat sekitar lokasi desa wisata Hutan Bambu.” (Selasa, 15 September 2020, 10.WIB)

Bapak Safi'i selaku kepala desa Sumbermujur juga mengatakan:

“Pada waktu peresmian desa wisata ini, saya dan juga perangkat desa ikut hadir, ada perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada juga yang mewakili dari babinsa, dan masyarakat desa Sumbermujur perwakilan per RT serta masyarakat sekitar lokasi sini ikut hadir semua menyaksikan peresmian desa wisata” (Sabtu, 19 September 2020, 08.00 WIB)

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan dalam perencanaan pengelolaan desa wisata adalah melakukan peresmian objek wisata sebagai destinasi wisata di kabupaten Lumajang. Kegiatan peresmian ini dilakukan dan dihadiri oleh pemerintah kabupaten yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah termasuk perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah desa dan perangkatnya, perwakilan dari keamanan masyarakat, tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh pemuda dan tokoh agama serta sekitar lokasi destinasi wisata. Kehadiran dan keikutsertaan masyarakat desa Sumbermujur ini merupakan bentuk dukungan pengelolaan desa wisata.

3. Pembentukan Kelompok sadar wisata

Setelah menjalani langkah pengajuan proposal dan peresmian, maka langkah yang harus diambil selanjutnya yaitu membentuk organisasi agar pelaksanaan di lapangan dapat terorganisir dengan baik. Organisasi yang dibentuk

dalam pengelolaan kepariwisataan berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar lokasi destinasi wisata. Keberadaan dari organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan ini bertujuan agar pengelolaan semakin mudah dijalankan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa wisata. Pembangunan desa wisata sangat memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat merupakan suatu unsur penting dalam melaksanakan dan mendukung kepariwisataan yang terbentuk dalam kelompok sadar wisata. Pokdarwis adalah organisasi masyarakat dan bertempat tinggal di wilayah destinasi wisata serta selalu menjadi prioritas untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kepariwisataan desa wisata Hutan Bambu. Berikut hasil wawancara dengan bapak Zainul Rofik selaku devisi pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan:

“ada amanah dari bupati tentang Satu Desa Satu Wisata disini masyarakat bersama pemerintah desa diharapkan membentuk kelompok sadar wisata yang dikomando oleh pemerintah desa. Anggota dalam kelompok tersebut biasanya masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan lingkungan.” (Senin, 21 September 2020, 09.00 WIB)

Bapak Safi'i selaku kepala desa Sumbermujur mengatakan:

“Ada suatu kelompok organisasi yang dibentuk yaitu Pokdarwis dan pembentukannya dari musyawarah masyarakat setempat, yang dibantu oleh pemerintah desa, dan bapak Agus Wijaya sebagai penggerak. Tokoh pemuda juga ikut serta membantu untuk merintis, dalam proses pembentukan organisasi tidak ditunjuk oleh dinas dan pemerintah desa melainkan atas hasil usulan masyarakat dan tokoh pemuda yang kemudian dimusyawarahkan bersama untuk mencapai mufakat, kemudian setelah terbentuk akan dilaporkan kepada pihak dinas kemudian perlu adanya pengukuhan dan Surat Keputusan dari Pihak Desa mas.” (Sabtu, 19 September 2020, 10.30 WIB)

Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis juga mengatakan:

“Melalui musyawarah bersama masyarakat dan campur tangan pemerintah desa dibentuknya Pokdarwis dan kemudian dikukuhkan oleh dinas. Pengelolaan desa wisata ini juga dilakukan dengan swadaya anggota Pokdarwis yang kebanyakan anggotanya dari masyarakat sekitar. Pokdarwis ini juga bisa dijadikan sebagai wadah untuk manampung ide atau pendapat guna untuk pengelolaan dan pengembangan desa wisata Hutan Bambu ini.” (Rabu, 23 September 2020, 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan berikutnya dalam proses pengelolaan desa wisata adalah membuat atau membentuk kelompok sadar wisata dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermujur Tahun 2014 . Pembentukan kelompok sadar wisata ini dilakukan oleh masyarakat desa Sumbermujur dan pemerintah daerah. Pengambilan keputusan organisasi kepengurusan dilaksanakan berasal dari usulan masyarakat kepada pemerintah. Pengambilan keputusan dan ikut serta dalam kepengurusan merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kelompok sadar wisata. Terbentuknya kelompok sadar wisata merupakan wadah partisipasi dari masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya dalam hal pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

4. Promosi

Promosi merupakan langkah awal untuk menyebarluaskan atau memperkenalkan tentang keberadaan sebuah destinasi wisata baru yaitu wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang. Adanya promosi diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar dengan cara menjunjung potensi wisata dan memberikan informasi serta daya tarik sehingga mendorong para wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata Hutan Bambu. Destinasi wisata ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak sehingga promosi yang akan dilakukan dapat tersampaikan dengan baik sesuai tujuan utama.

Berikut hasil wawancara oleh Bapak Safi'i selaku Kepala Desa Sumbermujur mengatakan:

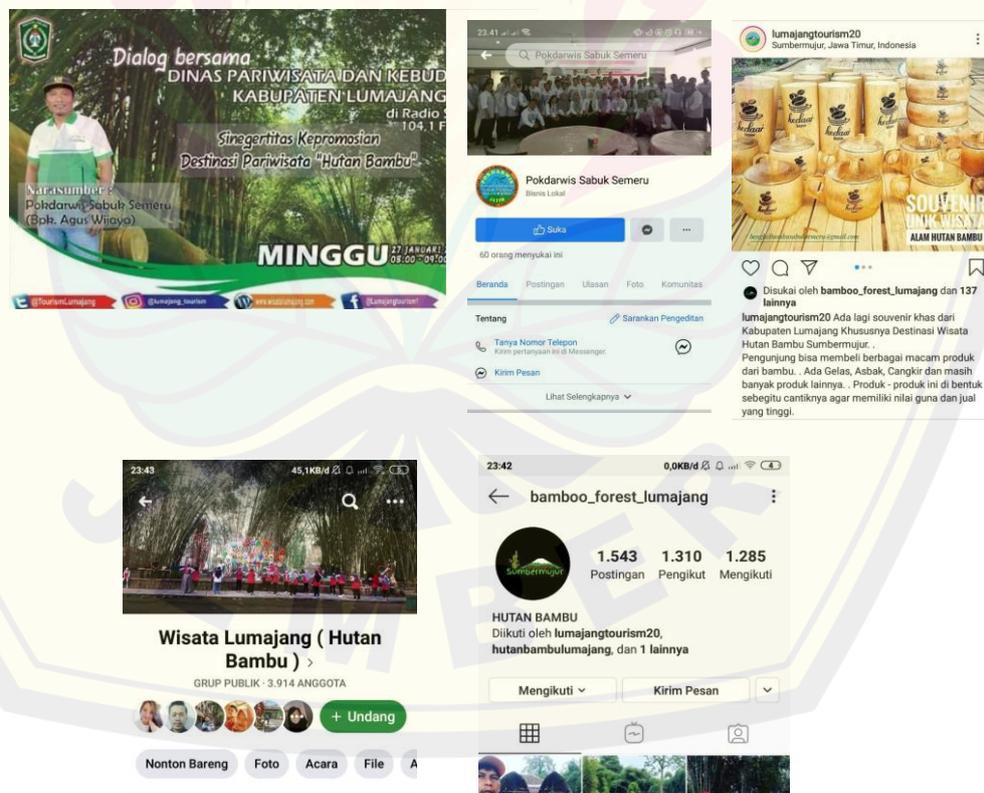
“Strategi kita yang sudah kita laksanakan, itu kami selalu mengandalkan kemufakatan, yang artinya kami selalu ingin menggait dari pihak-pihak manapun termasuk dari Dinas Pariwisata, termasuk bapak Bupati, termasuk PU, termasuk semuanya, untuk apa, untuk mendukung, karena destinasi ini tidak boleh karena sok kuat ya kita berdiri sendiri, itu tidak boleh”. (Senin, 28 September 2020, 10.00 WIB)

Sebuah promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara yang simpel dan cepat melalui media sosial yaitu membagikan foto dan video seputar desa wisata di facebook, instagram, youtube ataupun web desa

yang mana semua itu dapat diakses dengan mudah di zaman teknologi yang canggih sekarang ini. Tidak lepas pula promosi dengan media cetak perlu dilakukan, misalnya dengan memasukkan informasi desa wisata di majalah, koran, brosur, atau booklet sehingga masyarakat banyak yang mengenal wisata ini. cara yang paling sederhana dilakukan yaitu dari mulut ke mulut. Berikut hasil wawancara oleh Bapak Safi'i selaku Kepala Desa Sumbermujur:

“Kita mempromosikan lewat, kita punya Dinas Pariwisata KOMINFO, itu sudah kita titipin, kemudian kita punya youtube Hutan Bambu kita juga punya instagram, kita punya FB yang lebih menonjol sekarang, atau yang mungkin lebih efisien lagi mungkin ada teman saya, saudara saya, teman-teman dari Pokdarwis itu juga ikut disana untuk mempromosikan”. (Senin, 28 September 2020, 09.30 WIB)

Sesuai hasil wawancara di atas, sangat cocok dengan masa sekarang ini yang mana kita harus memperhatikan kesehatan dengan menjaga jarak sehingga promosi yang cocok dilakukan yaitu dengan membagikan di sosial media saja. Hal ini dapat diperjelas dengan Gambar 4.6 di bawah ini.



Gambar 4.6 Majalah, brosur, melalui media sosial instagram serta facebook kelompok sadar wisata “Sabuk Semeru”

Selain menggunakan cara di atas, Pokdarwis berinisiatif mengadakan *event* yang bertujuan untuk mempromosikan secara langsung destinasi wisata Hutan Bambu kepada seluruh masyarakat luar daerah. Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis mengungkapkan:

“Dulu kita membuat *event* lomba “Kidung” se-Lumajang pada tahun 2016, nah itulah, mulai dikenalnya Hutan Bambu, setelah itu kita adakan *event* lagi “Festival Tari” se-Jawa Bali pada waktu itu, tapi kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Kita selalu melakukan *event-event* terus mas untuk melakukan promosi” (Rabu, 30 September 2020, 09.00 WIB)

Promosi dapat dilakukan dengan banyak cara, sesuai inovasi dan kreatifitas pihak-pihak yang ikut serta membangun destinasi wisata tersebut, dicari bagaimana cara menarik minat pengunjung untuk datang ke tempat wisata.

5. Kerja sama

Pengelolaan kepariwisataan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan. Dukungan yang dimaksud adalah adanya kerja sama untuk mensukseskan pengelolaan agar berjalan dengan maksimal. Kerja sama yang dilakukan ada berbagai macam bentuk seperti penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas penunjang kepariwisataan serta keikutsertaan masyarakat dalam membantu proses kegiatan dalam mengelola destinasi wisata tersebut. Adanya proses kerja sama adalah langkah baik untuk menunjang proses kegiatan dalam mengelola desa wisata Hutan Bambu agar lebih baik kedepannya. Kerjasama yang dijalin oleh Pokdarwis sendiri yaitu dengan pemerintah desa Sumbermujur. Dukungan yang diberikan yaitu berupa memfasilitasi secara finansial dan penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu juga Pokdarwis bekerja sama dengan Dinas Pariwisata kabupaten Lumajang. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Safi'i selaku Kepala Desa Sumbermujur mengatakan:

“Untuk dukungan kami mencari dari pihak-pihak manapun termasuk dari Dinas Pariwisata, termasuk bapak Bupati, termasuk pijak Bank BRI, termasuk semuanya, untuk apa, untuk mendukung, karena destinasi ini tidak boleh karena sok kuat ya kita berdiri sendiri, kita pasti perlu yang namanya dukungan yang terpenting dukungan dari masyarakat”. (Selasa, 6 Oktober 2020, 08.30 WIB)

Tabel 4.3 Bentuk Kerjasama Kelompok Sadar Wisata

No	Pihak yang Melakukan Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Promosi melalui web, koran, brosur Pesona Indonesia.
2	Bank BRI	Memberikan warung, menyelenggarakan pelatihan kepada warga, dan masih banyak lagi.
3	Pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Sumbermujur	Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan awal seperti pasir, semen (donatur).
4	Masyarakat Desa Sumbermujur	Mengelola destinasi wisata dengan baik, menyediakan lahan parkir.
5	Puskesmas	Pengecekan air di pemandian.

Sumber: Data diolah dari Pokdarwis Sabuk Semeru

Pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berupa hutan yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis bambu, ratusan monyet dan kelelawar serta pemandian air sumber dari gunung Semeru oleh Pokdarwis sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun dikarenakan perlu adanya perkembangan lagi.

6. Program

Pengelolaan destinasi wisata tentunya harus memiliki program yang akan dilakukan oleh pengelola ke depan. Rencana kerja ini nantinya akan memberikan dampak perkembangan dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Hal tersebut juga dilakukan oleh pihak pengelola desa wisata Hutan Bambu yaitu pada tahap awal pembuatan program rencana kerja yang dibuat oleh para pengurus Pokdarwis kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar melalui musyawarah. Program yang telah disepakati ini terbagi menjadi dua yaitu program kegiatan jangka pendek dan program kegiatan jangka panjang. Berikut merupakan hasil wawancara bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis Sabuk Semeru:

“Rencana kerja pasti ada mas, rencana kerja ini meliputi pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang didalamnya ada perbaikan infrastruktur serta dibangunnya fasilitas-fasilitas guna mendukung daya tarik wisata tersebut. Sampai saat ini, rencana kerja yang telah dibuat sudah terlaksana dengan baik, teman-teman sudah melakukan gotong-royong setiap minggunya untuk memperbaiki bambu yang telah rusak. Masih ada jangka panjang kedepannya untuk membangun desa wisata ini. (Rabu, 30 September 2020, 09.30 WIB)

Rencana kerja untuk pembangunan desa wisata Hutan Bambu merupakan bagian dari inisiasi Pokdarwis serta telah disepakati oleh kepala desa Sumbermujur. Rencana tersebut juga sudah tertulis di proposal Pokdarwis. Rencana kerja yang utama yaitu pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan wisata yang ada di desa wisata tersebut agar dapat berjalan dengan baik seperti penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan pengelolaan yang lainnya. Selain itu kepala desa mendukung penuh atas semua rencana kerja yang telah dirancang oleh Pokdarwis sehingga nantinya desa wisata tersebut memiliki daya tarik wisata untuk menarik bagi pengunjung, seperti yang dikatakan oleh Bapak Safi'i selaku Kepala Desa Sumbermujur:

“Pembentukan destinasi wisata di desa Sumbermujur sudah menjadi fokus utama kita untuk pembangunan. Teman-teman Pokdarwis juga kita libatkan untuk mengelola dan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dan pengunjung. Pokoknya apa yang dibutuhkan pasti kita akan memfasilitasi”. (Sabtu, 3 Oktober 2020, 09.15 WIB)

Pengelolaan pariwisata menetapkan beberapa program yang akan dilakukan oleh pihak pengelola. Pada tahap awal pengelola desa wisata Hutan Bambu memiliki beberapa program yang telah dibuat bersama para anggota dan masyarakat sekitar lokasi destinasi wisata. Program yang telah dibuat oleh kelompok sadar wisata terbagi menjadi dua yaitu program jangka panjang dan program jangka pendek. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis:

“Kelompok sadar wisata dalam melakukan pengelolaan memiliki rencana kegiatan yang dibuat pada tahun 2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2019. Program kegiatan pada tahun 2015-2016, 2016-2017 atau selama 2 tahun difokuskan pada pembangunan dan penyediaan untuk sarana prasarana di lokasi destinasi wisata, kemudian program pada tahun 2017-2019 digunakan untuk pengembangan desa wisata dan

kegiatan yang lain. Program kerja itu sendiri dapat dilihat di proposal kami mas. Alhamdulillah, program kerja selama 2 tahun awal sudah terlaksana dengan baik dan sesuai keinginan masyarakat. Tinggal selanjutnya bagaimana upaya kita untuk mengembangkan desa wisata sekalian menunggu ada anggaran lagi, seperti itu mas.” (Rabu, 30 September 2020, 09.45 WIB)

Tabel 4.4 Program Kerja Kelompok Sadar Wisata

No	Program Kerja Jangka Pendek	Program Kerja Jangka Panjang
1	Membangun jalan di tempat wisata dan membangun jalannya air untuk pertanian di sekitar Hutan.	Partisipasi <i>event</i> tingkat regional maupun nasional.
2	Membangun tempat parkir.	Kantor pengelola Pokdarwis.
3	Arah penunjuk jalan di destinasi wisata.	Kuliner dan kerajinan di tempat wisata.
4	Membangun pintu masuk wisata.	Paket wisata.
5	Membangun musholla.	Souvenir khas desa wisata Hutan Bambu.
6	Membuat pemandian kolam renang anak.	Menyelenggarakan pentas seni dan budaya (tarian kolosal).
7	Membuat spot foto/selfie.	Konsep wisata yang selalu memanjakan para pengunjung.
8	Pos loket.	Melakukan studi banding dengan Pokdarwis lain.
9	Warung kecil di pelataran wisata.	
10	Membangun toilet.	
11	Menciptakan taman bunga yang diberi hiburan musik.	
12	Membangun <i>Homestay</i> atau penginapan	

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan dokumen Pokdarwis, 2015

Tabel 4.5 Rencana kegiatan 2015-2019 awal di desa wisata Hutan Bambu

No	Jenis Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Pelaksana
1	Membangun jalan di sekitar tempat wisata.	2015	3 bulan	Rp 200.000.000	Pokdarwis dan Masyarakat
2	Membangun tempat parkir.	2015	1 bulan	Rp 5.000.000	Pokdarwis
3	Arah penunjuk jalan di destinasi wisata.	2017	15 hari	Rp 10.000.000	Pokdarwis
4	Membangun pintu masuk wisata.	2016	2 bulan	Rp 25.000.000	Pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat
5	Membangun musholla.	2016	1,5 bulan	Rp 40.000.000	Masyarakat
6	Membuat pemandian kolam renang anak.	2016-2017	5 bulan	Rp 150.000.000	Pokdarwis dan Masyarakat
7	Kantor pengelola Pokdarwis.	2017	1 bulan	Rp 25.000.000	Pokdarwis
8	Pos loket.	2015	1 bulan	Rp 15.000.000	Pokdarwis
9	Warung kecil di pelataran wisata.	2016	2 bulan	Dari BRI	Masyarakat
10	Membangun toilet.	2016	1 bulan	Rp 20.000.000	Masyarakat dan Pokdarwis
11	Membangun jalannya air untuk pertanian di sekitar Hutan.	2015	2 bulan	Rp 20.000.000	Pemerintah, Pokdarwis, dan Masyarakat
12	Membuat inovasi yang dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. (Bengkel Bambu)	2016-2019	Berlanjut	Rp 100.000.000	Pemerintah, Pokdarwis, dan Masyarakat
13	Partisipasi <i>event</i> tingkat regional maupun nasional.	2016-2019	1-3 hari	Rp 150.000.000	Pemerintah dan Pokdarwis
14	Kuliner dan kerajinan di tempat wisata.	2016-2019	Berlanjut	Rp 75.000.000	Pokdarwis dan Masyarakat
15	Paket wisata.	2016-2019	Berlanjut	Rp 50.000.000	Pemerintah dan Pokdarwis

No	Jenis Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Pelaksana
16	Souvenir khas desa wisata Hutan Bambu.	2016-2019	Berlanjut	Rp 50.000.000	Masyarakat
17	Menyelenggarakan pentas seni dan budaya (tarian kolosal).	2016-2019	Berlanjut	Rp 75.000.000	Pemerintah dan Pokdarwis
18	Melakukan studi banding dengan Pokdarwis lain.	2016-2019	1-3 hari	Rp 30.000.000	Pokdarwis
19	Membangun <i>Homestay</i> atau penginapan	2016-2019	10 bulan	Rp 300.000.000	Pemerintah, Pokdarwis, dan Masyarakat
20	Menciptakan taman bunga yang diberi hiburan musik.	2016-2019	1 bulan	Rp 75.000.000	Pokdarwis dan Masyarakat
21	Membuat spot foto/selfie.	2016-2019	5 bulan	Rp 100.000.000	Pokdarwis dan Masyarakat

Sumber: Proposal dokumen Pokdarwis

Dari hasil perencanaan yang dibuat oleh pokdarwis selama beberapa tahun kebelakang, dapat dilihat bahwa perencanaan berjalan dengan lancar dikarenakan pendapatan yang di peroleh mampu mencukupi anggaran untuk melaksanakan pembangunan. Akan tetapi pada saat pandemi tahun 2020 saat ada wabah virus covid 19, destinasi sempat tutup dan berimbas pada pemasukan karena destinasi menggantungkan pendapatannya pada pengunjung. Tentunya hasil perencanaan juga terhambat, pembangunan penambahan fasilitas juga terhambat dikarenakan penghasilan sedikit. Seperti yang disampaikan bapak Rudi selaku bendahara pokdarwis :

"Untuk tahun 2020 ini tahun yang sulit mas bagi kami. Awal tahun sekitar bulan maret ya mungkin hutan bambu sempat tutup total dan tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi berimbas pada penghasilan juga mas. Biasanya ribuan, sekarang hanya 300-800 an pengunjung itupun pas libur akhir pekan, kalo hari biasa ngga sampe 500an lah. Jadi ya menyesuaikan mas kalo misal mau bangun apa, jadi pelan pelan mas yang penting selesai gitu. Yang melaksanakan pembangunan mulai dulu ya anggota pokdarwis mas, saling membantu lah satu sama lain,

meskipun dibayar cuma sedikit mas". (Sabtu, 10 Oktober 2020, 10.15 WIB)

Bapak Safii selaku Kepala Desa Sumbermujur juga mengatakan:

“Agak sulit juga di tahun 2020 ini bagi kami pengelola Desa Wisata Hutan Bambu mas, dikarenakan ada wabah Covid19 yang otomatis wisata tutup. Kami selama ini juga mandiri mas, artinya sementara ini tidak masuk APBDes. Akan tetapi kami punya MoU dengan Pokdarwis, dimana keuntungan 80% masuk ke Pokdarwis, 20% sisa masuk ke Desa. Tapi itu secara tertulis, nyatanya saat ini tidak. Semua keuntungan masuk ke Pokdarwis dengan syarat keuntungan agar dibuatkan fasilitas umum di Hutan Bambu”. (Rabu, 1 Juni 2022, 15.30 WIB)

Proses perencanaan berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, pokdarwis, dan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu. Masyarakat sudah melakukan beberapa kegiatan dan program yang dijalankan sebelum dan setelah wisata tersebut ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata di kabupaten Lumajang. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang sadar akan wisata tidak terlepas dari partisipasi. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari bentuk dukungan yang diberikan kepada komunitas wisata dan tokoh masyarakat yang akan melakukan kegiatan pengajuan proposal. Musyawarah rencana pengelolaan pariwisata mendapatkan partisipasi dari masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kelompok sadar wisata. Pengambilan keputusan penetapan ketua Pokdarwis masyarakat yang memutuskan atas dasar Surat Keputusan Desa Sumbermujur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengukuhkan. Bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat dari pengambilan keputusan dalam pembentukan kepengurusan kelompok sadar wisata dan masyarakat juga terlibat dalam keanggotaan.

Promosi dilakukan oleh kelompok sadar wisata, kegiatan ini tidak dilakukan oleh pengurus Pokdarwis saja melainkan oleh masyarakat yang berada di luar kota kabupaten Lumajang. Promosi dilakukan dengan berbagai cara, di era teknologi yang canggih sekarang ini sangat mudah untuk melakukan promosi melalui sosial media, seperti instagram, facebook, dan lain-lain karena dapat disebar lebih cepat dibanding menggunakan penyebaran manual, akan tetapi harus disertai dengan media cetak seperti *platform* agar menarik minat para pengunjung untuk

datang. Kegiatan promosi ini dilakukan oleh kelompok sadar wisata yaitu melalui media sosial masing-masing anggota serta akun resmi Pokdarwis “Sabuk Semeru” seperti instagram dan facebook. Promosi dilakukan juga dengan mengadakan *event-event* bertujuan agar menarik minat pengunjung ke destinasi wisata ini. Kegiatan promosi tidak hanya dilakukan oleh kelompok sadar wisata saja melainkan dibantu oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang.

Pengelolaan di desa wisata Hutan Bambu merupakan pengelolaan yang bersifat swadaya, maka dari itu kelompok sadar wisata juga membuka peluang untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dilakukan untuk mendukung segala urusan yang dilakukan kelompok sadar wisata dan tujuannya lainnya untuk memenuhi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola bersama dengan pihak-pihak terkait merupakan suatu bentuk partisipasi terhadap sektor lain dalam pengelolaan desa wisata. Kerjasama dengan pihak pengusaha pengusaha yang ada di desa Sumbermujur, kerjasama dengan Bank BRI, dengan BUMDes, Disparpora, serta masyarakat atau komunitas yang terdapat di desa Sumbermujur.

Perencanaan selain melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan, juga mencangkup program kerja yang akan dilakukan untuk mempercepat perkembangan suatu pengelolaan wisata. Kelompok sadar wisata memiliki beberapa program kerja yang ditulis dalam rapat tahunan. Program kerja tersebut terdiri dari program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek pada masa 2015-2019. Beberapa program kerja jangka pendek meliputi membangun jalan di tempat wisata dan membangun jalannya air untuk pertanian di sekitar Hutan, membangun tempat pos loket, warung kecil di pelataran wisata, membangun toilet, menciptakan taman bunga yang diberi hiburan musik, dan membangun *Homestay*. Berdasarkan pengamatan peneliti serta dicocokkan dengan dokumentasi yang ada, program kerja jangka pendek sudah terlaksana dengan baik dan masih ada pengembangan-pengembangan lainnya untu kemajuan desa wisata ke depannya.

Program kerja jangka panjang meliputi partisipasi *event* tingkat regional maupun nasional, kantor pengelola Pokdarwis, kuliner dan kerajinan di tempat wisata, paket wisata, souvenir khas desa wisata Hutan Bambu, menyelenggarakan pentas seni dan budaya (tarian kolosal), konsep wisata yang selalu memanjakan para pengunjung,. Beberapa analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan desa wisata Hutan Bambu telah terlaksana dengan baik, namun dikarenakan ada Covid-19 pada tahun 2020 sehingga membuat destinasi tutup maka menghambat proses perencanaan yang telah dibuat.

4.2.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu ini dilakukan oleh berbagai pihak terutama kelompok sadar wisata yang telah ditunjuk sebagai pengelola utama desa wisata. Pembentukan organisasi bertujuan agar segala urusan kepariwisataan dapat berjalan dengan maksimal. Hasil dari pengorganisasian ini dapat dilihat dari bagaimana anggota menjalankan peran dan tugas serta kinerja yang telah dicapai atau dilakukan oleh kelompok sadar wisata. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peran penting seperti fungsi perencanaan. Adanya fungsi pengorganisasian, maka seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi akan diatur penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pembentukan struktur organisasi Pengelola desa wisata

Kelompok Sadar Wisata atau biasa disebut dengan POKDARWIS menurut Kementerian Pariwisata (2012:2016) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

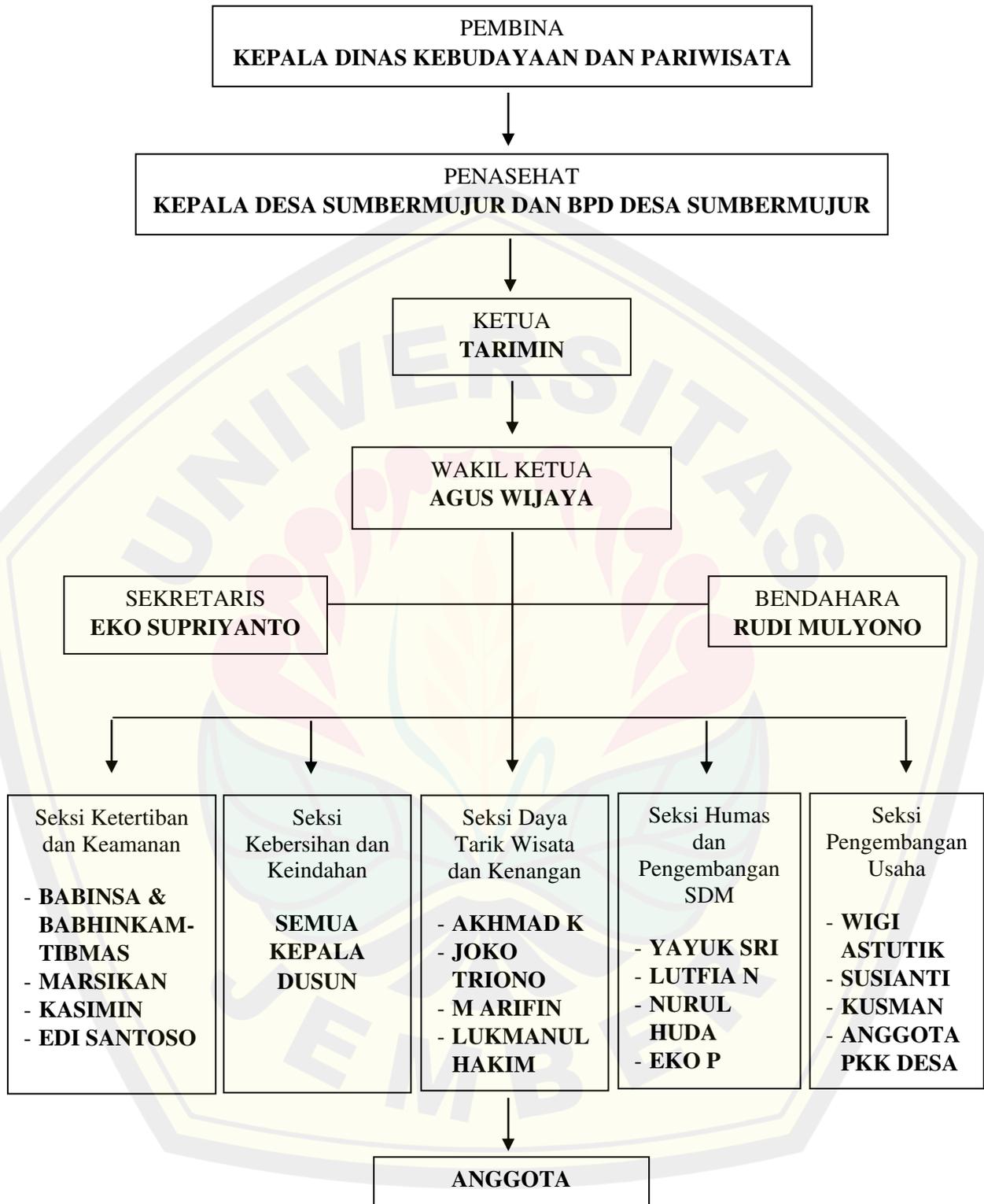
Pokdarwis merupakan lembaga pengelola kegiatan konseptor penampung aspirasi masyarakat, motivator, perencana, sekaligus pelaksana program yang

telah disusun bersama-sama pemangku kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan visi dan misinya. Desa Sumbermujur membentuk kelompok sadar wisata dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan pembangunan desa wisata dapat menekan laju pertumbuhan kemiskinan, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya keterlibatan masyarakat dalam pemerdayaan pembangunan desa wisata mutlak harus terlibat di dalamnya sesuai dengan kompetensi, skill, kreativitas, inovasi, untuk di dalam pengelolaan kegiatan dan usaha yang mereka lakukan dapat berjalan lancar agar permasalahan dan kendala dapat terpecahkan, menghasilkan industri pariwisata yang layak jual.

Pada tahun 2014, diadakan pengukuhan Kelompok Sadar Wisata yang diberi nama “Sabuk Semeru” melalui surat peraturan desa Sumbermujur dan surat keputusan kepala desa Sumbermujur nomor 141/29/427.903.06/2014. Hasil pembentukan Pokdarwis selanjutnya dilaporkan ke kecamatan untuk selanjutnya diteruskan dan dicatat oleh Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan pengesahan dan pembinaan lebih lanjut.

Pada pembentukan Pokdarwis terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Prosedur pembentukan dilengkapi dengan memilih pengurus Pokdarwis yang telah terbagi sesuai dengan fungsinya guna mendukung pengelolaan desa wisata yang maju dan bermutu. Berikut struktur organisasi Pokdarwis “Sabuk Semeru” disajikan di dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Struktur organisasi POKDARWIS “Sabuk Semeru”



Sumber: Profil Pokdarwis Desa Sumbermujur, 2020

Susunan pengurus tersebut terdiri dari pembina, penasehat, pengurus inti dan pengurus yang terbagi atas seksi-seksi dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah antara lain jabatan pembina yang dipegang oleh pemerintah dinas kabupaten, penasehat yang dipegang oleh unsur pemerintah dari kepala desa dan BPD desa sedangkan unsur yang lain seluruhnya diisi oleh masyarakat terutama golongan muda yang lebih giat dan berkibar terhadap perkembangan dunia luar. Setidaknya dari pemilihan pengurus tersebut sudah sangat terlihat upaya untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi karena melibatkan unsur-unsur tata kelola wisata yang baik yaitu seluruh elemen harus bergabung.

Harapan setelah adanya Kelompok Sadar Wisata yaitu menjadi tonggak penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Kapasitas Sumber daya manusia organisasi pengelola

Adanya keinginan anggota untuk bergabung ke dalam kepengurusan Pokdarwis tidak berdasarkan syarat-syarat tertentu atau khusus, akan tetapi mengacu pada komitmen serta dorongan yang dimiliki oleh anggota guna mengelola desa wisata Hutan Bambu tersebut. Berdasarkan penelitian di lapangan, komitmen para anggota Pokdarwis serta masyarakat dalam mengelola desa wisata Hutan Bambu yaitu dengan penyediaan fasilitas seperti penyediaan tempat parkir agar kendaraan pengunjung tertata dengan rapi. Komitmen yang diberikan selanjutnya oleh Pokdarwis adalah menjaga kebersihan lingkungan wisata Hutan Bambu, menjaga kelestarian bambu, serta menjaga keamanan para pengunjung. Timbulnya komitmen didasarkan atas hasil capaian dari pengelolaan wisata Hutan Bambu yakni adanya peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Semangat kerja didasarkan atas nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat sekitar seperti semangat gotong-royong dan kekompakannya. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis desa Sumbermujur mengatakan:

“Yang bergabung di dalam kepengurusan tentunya masyarakat yang memiliki kesadaran serta motivasi tinggi untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di sini sebagai salah satu prospek ekonomi di desa

Sumbermujur. Kebetulan saya juga yang mempromosikan masyarakat pariwisata Hutan Bambu di Kabupaten Lumajang”. (Rabu, 30 September 2020, 10.00 WIB)

Kemampuan dan pengetahuan masyarakat di desa Sumbermujur sudah sedikit paham tentang penyelenggaraan pariwisata tersebut. Kemampuan warga setempat ini di tunjukkan dengan antusias masyarakat. Salah satu wujud antusias tersebut adalah 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Pengunjung merasa senang dan nyaman saat disambut dengan pelayanan 5S tersebut dari masyarakat sekitar. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan pengunjung wisata ke depannya dan itu tidak terlepas dari peran serta keahlian Pokdarwis dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Safi'i selaku kepala desa wisata Hutan Bambu desa Sumbermujur:

“Strategi kami, karena kami ada Sapta Pesona, ayoklah kita sebagai pelaku dari Pokdarwis, kita harus faham. Ayo utamakan senyum dulu ke masyarakat”. (Selasa, 6 Oktober 2020. 11.30 WIB)

Sapta Pesona ini sangat perlu dilakukan untuk membuat para pengunjung senang datang ke desa wisata Hutan Bambu. Pengunjung dilayani tanpa ada rasa marah atau jengkel kepadanya saat pengunjung melakukan kesalahan serta memberikan kritik dan saran mengenai destinasi wisata tersebut.

Pengorganisasian merupakan proses menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan.

Pengorganisasian yang disusun dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu yaitu organisasi pelaksana di lapangan yang di dalamnya terdiri dari masyarakat asli sehingga terbentuk menjadi sebuah komintas/kelompok sadar wisata. Pengorganisasian pasti tidak terlepas dari faktor kepemimpinan yang terstruktur. Kepala desa Sumbermujur memiliki otoritas tinggi di wilayahnya dan berkewajiban untuk mengatur dan mengelola segala urusan pemerintahan desa.

Kepala desa Sumbermujur telah memberikan kewenangannya kepada masyarakat untuk mengelola potensi yang ada di desa Sumbermujur, yaitu desa wisata Hutan Bambu.

Proses pengorganisasian sendiri dilakukan secara demokratisasi yaitu dengan mengajak masyarakat ikut andil berpartisipasi dalam kepengurusan keorganisasian. Masyarakat juga diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan penetapan kelompok sadar wisata. Pembentukan kelompok sadar wisata ini, dilakukan dengan cara pengusulan oleh masyarakat dan masyarakat juga yang memutuskan. Mekanisme pemilihan tersebut, yaitu melalui musyawarah desa terutama para tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di desa Sumbermujur. Adapun alasan dari penunjukan tersebut adalah karena memberikan kesempatan terhadap masyarakat ataupun pemuda untuk bekerja, berwirausaha, ataupun berkegiatan dalam mengelola desa wisata tersebut.

Pemilihan pengurus ataupun anggota kelompok sadar wisata tidak ada syarat-syarat tertentu atau kriteria seperti jenjang pendidikan maupun pengalaman, yang terpenting yaitu memiliki kesadaran serta motivasi dan komitmen dari masing-masing individu untuk mengelola potensi yang ada di desa untuk dijadikan destinasi wisata. Selain itu pengurus Pokdarwis juga melakukan studi banding dan mendapatkan binaan untuk menambah keahlian dan pengetahuan dalam mengelola desa wisata tersebut. Berdasarkan analisis di atas bahwa proses pengorganisasian sudah berjalan secara optimal didukung dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di desa wisata Hutan Bambu yang dikatakan sudah luas.

4.2.3 Penyelenggaraan/Pelaksanaan

Pengelolaan desa wisata Hutan Bambu tidak terlepas dari pelaksanaan/penyelenggaraan. Pelaksanaan menyangkut segala apa saja yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata dalam proses pengelolaan diantaranya bagaimana pada waktu kelompok sadar wisata melaksanakan kegiatan di lapangan dan melaksanakan proses pengorganisasian. Pelaksanaan juga mencakup bagaimana pihak pengelola dalam melakukan penggerakan atau mengajak

masyarakat sekitar lokasi ikut serta mendukung dan ikut menikmati dampak positif dari adanya destinasi wisata.

Tabel 4.7 Rencana kegiatan 3 tahun awal di desa wisata Hutan Bambu

No	Rencana kegiatan pada tahun 2015 – 2017	Ket	Rencana kegiatan pada tahun 2017 - 2018	Ket
1	Membangun jalan di sekitar tempat wisata.	Sudah Terealisasi	Membuat inovasi yang dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. (Bengkel Bambu)	Sudah Terealisasi
2	Membangun tempat parkir.	Sudah Terealisasi	Partisipasi <i>event</i> tingkat regional maupun nasional.	Sudah Terealisasi
3	Arah penunjuk jalan di destinasi wisata.	Sudah Terealisasi	Kuliner dan kerajinan di tempat wisata.	Sudah Terealisasi
4	Membangun pintu masuk wisata. (Gerbang)	Sudah Terealisasi	Paket wisata.	Sudah Terealisasi
5	Membangun musholla.	Sudah Terealisasi	Souvenir khas desa wisata Hutan Bambu.	Sudah Terealisasi
6	Membuat pemandian kolam renang anak.	Sudah Terealisasi	Menyelenggarakan pentas seni dan budaya (tarian kolosal).	Sudah Terealisasi
7	Kantor pengelola Pokdarwis.	Sudah Terealisasi	Konsep wisata yang selalu memanjakan para pengunjung.	Berjalan
8	Pos loket.	Sudah Terealisasi	Melakukan studi banding dengan Pokdarwis lain.	Sudah Terealisasi
9	Warung kecil di pelataran wisata.	Sudah Terealisasi	Membangun <i>Homestay</i> atau penginapan	Berjalan
10	Membangun toilet.	Sudah Terealisasi	Menciptakan taman bunga yang diberi hiburan musik.	Sudah Terealisasi
11	Membangun jalannya air untuk pertanian di sekitar Hutan.	Sudah Terealisasi	Membuat spot foto/selfie.	Berjalan

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan dokumen Pokdarwis, 2020

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku sekretaris desa Sumbermujur:

“Pembangunan direalisasikan sesuai pendapatan yang diperoleh dari pengunjung mas, sekarang masih masa pandemi kegiatan-kegiatan rutin sudah tidak berjalan seperti tahun-tahun kemarin, akan tetapi untuk pembangunan seperti pembangunan spot foto/selfi, penginapan, dan konsep yang lainnya masih harus tetap berjalan, masih dikerjakan mas.” (Sabtu, 17 Oktober 2020, 08.45 WIB)

Pelaksanaan kegiatan perencanaan sudah berjalan dengan baik, rencana kegiatan di awal tahun pembentukan maupun di tahun selanjutnya sampai

sekarang, akan tetapi terhalang oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan rutin seperti pertunjukan tari ataupun *event-event* lainnya tidak boleh dilaksanakan. Tepatnya pemerintah desa meminimalisir adanya kerumunan di desa wisata tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis:

“Tugas dan tanggung jawab kita sebagai kelompok sadar wisata berpedoman pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga kelompok sadar wisata. Tugas dan tanggung jawab dari semua anggota sudah berjalan. Solusi yang diberikan jika ada salah satu bidang berhalangan ada pekerjaan lain di luar, maka segera kita mencari cadangan untuk menjadi pengganti sementara.” (Rabu, 30 September 2020, 09.15 WIB)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu anggota Pokdarwis:

“Kami sudah terbagi dalam beberapa bidang seksi, mas. Walaupun seperti itu, kami melakukan tugas secara bersama-sama dan gotong-royong. Misalnya saja saya sebagai anggota membantu seksi bidang keamanan, dari keamanan juga ikut serta membantu bidang kebersihan. Pokoknya semua berpikir dalam kesatuan wadah yang sama, jika ada yang memerlukan bantuan kita tangani bersama-sama.” (Rabu, 30 September 2020, 09.45 WIB)

Tabel 4.8 Deskripsi Tugas Kelompok Sadar Wisata

Pengurus	Tugas
1. Pembina Pemerintah Daerah diwakili Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melakukan pembinaan secara langsung dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur pembina dengan Pokdarwis sebagai pihak yang dibina melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan.
2. Penasehat	Memberikan masukan, kritik dan saran kepada tim pengelola.
3. Ketua Pokdarwis	Memimpin kelompok sadar wisata, memberikan pengarahan kepada anggota, mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta bertanggung jawab mengenai hal keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Wakil Ketua Pokdarwis	Membantu tugas ketua, mewakili ketua dalam berbagai kegiatan bila ketua berhalangan.
5. Sekretaris Pokdarwis	Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi, mencatat pertemuan atau rapat dalam kelompok.
6. Bendahara Pokdarwis	Bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran uang, melaporkan pendapatan pada waktu rapat.
7. Seksi Ketertiban dan Keamanan	Menciptakan ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi desa wisata.
8. Seksi Kebersihan dan Keindahan	Menyelenggarakan kegiatan keindahan dan kebersihan.
9. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan	Mempromosikan berbagai daya tarik wisata dan keunikan lokal, menggali, membina dan mengembangkan berbagai potensi sumberdaya wisata, serta kekhasan sebagai daya tarik dan unsur kesenangan.
10. Seksi Humas dan Pengembangan SDM	Mengembangkan bentuk-bentuk informasi dan publikasi serta kegiatan Pokdarwis.
11. Seksi Pengembangan Usaha	Menjalin hubungan dan kerjasama kemitraan, baik di dalam maupun di luar yang berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok.
12. Anggota Pokdarwis	Melakukan operasional di lapangan dan berkoordinasi dengan seksi-seksi.

Sumber : Anggaran Dasar dan Rumah Tangga kelompok sadar wisata

Pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan dilakukan oleh pengurus kelompok sadar wisata yang telah dibagi menjadi kelompok operasional. Kelompok operasional berasal dari kelompok sadar wisata yaitu sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014. Pelaksana operasional di lapangan terdiri dari penjagaan parkir, penjagaan tiket, penjagaan view point, dan petugas kebersihan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis mengatakan:

“Iya mas, kami diarahkan oleh dinas ya untuk membentuk suatu struktur Pokdarwis yang dimana anggotanya dari lokal desa Sumbermujur. Posisi kita sebagai penggerak utama, sedangkan pemerintah desa sebagai fasilitator dan penasehat. Jadi yang melakukan tugas operasional ya kita mas. Jumlah anggota kami ada 30 orang, dari jumlah tersebut yang aktif dalam organisasi ya ada 30 orang itu. Dari 30 orang tersebut kita bagi menjadi 3 bagian biasanya.” (Rabu, 30 September 2020, 08.30 WIB)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Joko selaku anggota kelompok sadar wisata:

“Benar mas, biasanya kalau akhir akhir pekan kan ramai, jadi anggota di rolling untuk bergantian menjaga tempat parkir dan seluruh kegiatan pada akhir pekan. Akan tetapi karena saat ini ada pandemi covid ini mas, jadi *gak* ada kegiatan sama sekali, anggota sesempatnya saja mas, karena pada hari biasa tergolong sepi dan pada hari weekend lumayan ramai.” (Sabtu, 3 Oktober 2020, 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel deskripsi tugas kelompok di atas dapat diketahui bahwa kelompok sadar wisata telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok sadar wisata sudah terlaksana dengan baik. Pokdarwis yang berada di destinasi wisata Hutan Bambu juga mempunyai kewajiban sebagai pelaku operasional atau sebagai pelaksana teknis kepariwisataan. Pembagian tugas dan rapat kelompok ini dilakukan apada saat rapat evaluasi. Dari 30 anggota dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok ada sepuluh anggota pelaksana setiap anggota bertugas bergiliran per minggunya. Sepuluh orang yang bertugas setiap hari telah dibagi dalam penjagaan tiket, penjagaan parkir, kebersihan dan petugas keamanan, serta di masa pandemi seperti ini ada tambahan kerj untuk mengecek suhu, dan mengawasi para pengunjung untuk tidak berkerumun. Pelaksana teknis kebersihan dan keamanan dilakukan untuk membantu pekerjaan seksi kebersihan dan keamanan. Dalam menjalankan tugas di lapangan, kelompok operasional dibantu oleh anggota lain yang tidak bertugas dan masyarakat sekitar.

Peran pemimpin atau ketua memiliki posisi yang sentral untuk menggerakkan anggota. Peran ditunjukkan dengan mengkoordinasi proses kerja dalam hubungan internal maupun eksternal. Kepala desa Sumbermujur menunjukkan kemampuan melalui upaya mengajak masyarakat selalu berbuat baik ke semua demi menjaga destinasi wisata yang dimiliki desa tersebut. Kepala desa juga mengajak seluruh masyarakat turut serta mengembangkan potensi desa wisata Hutan Bambu berupa objek wisata Hutan Bambu dan sektor pertanian serta perkebunan di daerah tersebut. Berikut merupakan wawancara dengan Bapak Safi'i selaku Kepala Desa Sumbermujur mengatakan:

“kita semua melakukan pengelolaan secara bersama-sama, saya memiliki wewenang untuk mengkoordinir itu semua, tetapi ya saya tidak hanya mengkoordinir saja, sering kali saya datang ke lokasi dimana teman-teman Pokdarwis melakukan kegiatan. Biasanya kami melihat dari desa lain yang memiliki wisata untuk diaplikasikan di desa wisata Hutan Bambu”. (Selasa, 6 Oktober 2020, 08.45 WIB)

Pelaksanaan dalam mengelola desa wisata Hutan Bambu mengacu pada asa demokratis dan didukung oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan operasional di lapangan melalui Pokdarwis untuk mengelola objek wisata Hutan Bambu. Pelaksanaannya berdasarkan struktur Pokja masing-masing. Setiap Pokja harus melaksanakan serta membuat laporan mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Pokdarwis sangat menghargai antusias masyarakat untuk pembangunan destinasi wisata ini khususnya pelaksanaan Sapta Pesona yang dilakukan masyarakat. Pola perilaku masyarakat lebih tertata dibanding sebelum didirikannya destinasi wisata ini. Kepala desa selalu mengingatkan masyarakatnya untuk selalu berbuat baik kepada semua karena jika perbuatan kita baik maka akan mendapatkan balasan yang baik juga, begitu pula dengan wisata yang ada di desa ini. Berikut merupakan wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim selaku Pokja Daya Tarik Wisata mengatakan:

“Masyarakat sudah melakukan Sapta Pesona dengan sangat baik, mas. Masyarakat disini paham betul mengenai bagaimana bersikap yang baik terhadap pengunjung, melakukan 5S setiap bertemu pengunjung, masyarakat juga tidak merasa terganggu dengan banyaknya pengunjung yang melewati rumah mereka. Intinya semua sudah

terrealisasikan dengan baik tanpa adanya paksaan, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, sehingga desa wisata ini memiliki daya tarik yang memadai”. (Sabtu, 10 Oktober 2020, 09.15 WIB)

Terwujudnya Sapta Pesona yang ada di desa wisata Hutan Bambu sudah memiliki beberapa kriteria. Segi kamanan sudah diterapkan dengan baik seperti penjagaan di pelataran wisata dan penjagaan kendaraan di tempat parkir sudah dilaksanakan dengan sigap oleh anggota Pokdarwis. Penjagaan di tempat lokasi wisata sangat membantu mengarahkan pengunjung ke setiap objek dan juga menjaga keamana apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Masa sekarang yaitu masa pandemi Covid-19 yang mana kesehatan, imun tubuh harus selalu dijaga. Tempat wisata diperbolehkan beroperasi akan tetapi wajib mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter serta mencuci tangan secara teratur. Masa pandemi membuat Pokdarwis merancang rencana yang akan dilakukan, salah satu contoh telah dibagi sebanyak 5 anggota untuk menjaga di setiap sudut destinasi wisata. Tujuan dibentuknya koordinator ini guna memberikan penjelasan dan mengingatkan pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga pengunjung aman setelah berwisata di desa Sumbermujur.

Pada tahap pelaksanaan kepariwisataan, diwujudkan dengan upaya memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Berbagai macam atraksi wisata serta pelayanan yang disediakan oleh pihak pengelola serta masyarakat. Berikut merupakan bentuk pelayanan yang disediakan oleh pengunjung saat berkunjung di desa wisata Hutan Bambu disajikan di dalam Tabel 4.9 di bawah.

Tabel 4.9 Bentuk Pelayanan Kepada Wisatawan

No	Fasilitas	Keterangan
1	Retribusi Masuk	a. Rp 5000/orang b. Rp 3000/anak
2	Penitipan Kendaraan	a. Rp 2000/motor b. Rp 5000/mobil
3	Atraksi Wisata	a. Pemandian wisata b. Inovasi Bengkel Bambu c. Berbagai macam jenis bambu d. Souvenir, batik, dan kerajinan dari bambu e. Budaya salah satunya tarian kolosal

Sumber: Data diolah dari Pokdarwis Sabuk Semeru

Proses penyelenggaraan/pelaksanaan juga mencakup bagaimana pihak pengelola menyediakan segala fasilitas untuk mendukung kegiatan kepariwisataan. Keterlibatan masyarakat selain untuk mendukung kegiatan kepariwisataan dilakukan untuk memberikan nilai kemanfaatan khususnya sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Walaupun pekerjaan yang ditawarkan tidak lebih baik dari sektor lain namun memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Pengurus kelompok sadar wisata mengajak masyarakat sekitar lokasi pariwisata untuk ikut mendukung dengan cara menyediakan berbagai fasilitas kegiatan kepariwisataan. Berikut wawancara Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis mengatakan:

“Saya sudah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam anggota Pokdarwis ini mas, saya beserta rekan-rekan Pokdarwis mengajak mereka dengan mendatangi rumah-rumah satu per satu dan sekaligus bertamu. Akhirnya kita mengajak untuk ikut dalam musyawarah yang dilaksanakan setiap bulan dan di dalam musyawarah tersebut kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dan menambah rancangan untuk kegiatan selanjutnya.” (Sabtu, 3 Oktober 2020, 09.30 WIB)

Adanya pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur diharapkan memberikan memberikan nilai manfaat yaitu salah satunya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan bertujuan untuk memperbaiki nilai sosial ekonominya. Berikut merupakan wawancara Bapak Eko Supriyanto selaku sekretaris Pokdarwis Sabuk Semeru:

“oo ya pasti nilai sosial dan ekonominya meningkat mas, soalnya di desa ini banyak pemuda yang belum memiliki kesibukan, dulunya masih suka cangkruk sana cangkruk sini, sampai ada yang menuju ke ranah negatif sebagai contoh minum alkohol, itu semua kami sangat menyayangkan. Pemuda ini generasi yang masih memiliki banyak waktu untuk berkarya. Nah, maka dari itu kami jadikan mereka sebagai anggota Pokdarwis yang akan ikut serta membantu masyarakat untuk berpartisipasi dan mengelola wisata ini, sehingga mereka akan mempunyai kesibukan yang positif”. (Sabtu, 10 Oktober 2020, 08.00 WIB)

Adanya desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur tentunya akan memberikan manfaat hasil dari kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat. Pokdarwis sendiri mengajak masyarakat untuk berwirausaha seperti mengisi warung di pelataran wisata dan nantinya akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk selalu memajukan desa wisata ini. Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Julaiha selaku pengisi warung pemberian Bank BRI mengatakan:

“saya sangat senang dengan adanya destinasi wisata di sini dek, kenapa saya senang, karena sejak adanya wisata, saya bisa berjualan disini, apalagi pengunjung selalu berdatangan, rame-ramenya itu pas hari Minggu atau setelah hari lebaran, pasti orang-orang memilih tempat ini untuk liburan bareng keluarganya. Semakin ramai pengunjung, semakin laris juga jualan saya, hehehe”. (Sabtu, 17 Oktober 2020, 10.15 WIB)

Sesuai hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dengan didirikannya sebuah desa wisata akan menambah pemasukan para penduduk sekitar. Segi ekonominya masyarakat sekitar akan meningkat, mengingat ramainya wisatawan yang datang mengunjungi wisata tersebut. Seluruh warung penuh diisi oleh masyarakat sekitar, masyarakat sangat antusias untuk berjualan. Adanya wisata ini juga mendorong masyarakat lebih kreatif dan inovatif dalam mengolah bambu untuk dijadikan beberapa souvenir yang ramai dicari oleh para pengunjung.

Beberapa keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan desa wisata Hutan Bambu:

1. Masyarakat desa Sumbermujur terlibat dalam penjagaan tiket masuk, penjagaan parkir, dan ada penjagaan stand bunga.

2. Ibu rumah tangga terlibat dalam pembuatan kerajinan berupa souvenir dari bambu dan berdagang di dalam area destinasi wisata seperti berjualan sayur mayur, dan aneka makanan lainnya.
3. Kerja bakti, hal ini dilakukan setiap satu bulan sekali terkait dengan pemeliharaan kawasan desa wisata mulai dari gerbang selamat datang sampai ke area loket demi menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung.

Pelayanan kepariwisataan yang baik harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok sadar wisata dan masyarakat desa Sumbermujur terlibat dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan desa wisata. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut meliputi *homestay*, akses jalan, tempat parkir, kamar mandi umum, musholla, kolam renang, spot foto, stand bunga, kuliner dan berbagai macam kerajinan dari bambu.

1. *Homestay* atau penginapan

Peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan kepariwisataan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di suatu destinasi wisata. Berkaitan dengan hal tersebut kelompok sadar wisata mengajak masyarakat dalam penyediaan *homestay*. Desa Sumbermujur memiliki berapa *homestay* dimana ada beberapa di rumah warga dan ada di dalam obyek wisata, tetapi belum semua dapat digunakan dan masih dalam proses pembangunan. *Homestay* digunakan untuk pengunjung yang ingin bermalam atau yang ingin beristirahat serta menikmati keindahan panorama alam di lokasi wisata.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis:

“Jadi gini mas, untuk *homestay* saat pandemi itu tidak terlalu ramai seperti biasanya. Jika dulu sebelum pandemi, biasanya *homestay* dipenuhi oleh para peserta paket wisata karena kita juga membuka beberapa menu paket wisata dan sekarang, hanya beberapa saja yang mengambil paket wisata tersebut.” (Sabtu, 3 Oktober 2020, 11.15 WIB)



Gambar 4.7 *homestay* desa wisata Hutan Bambu

2. Penyediaan Musholla dan Kamar mandi umum

Kepariwisataan khususnya desa wisata harus memiliki prasarana umum untuk pengunjung. Disini masyarakat tergerak untuk menyediakan musholla dan kamar mandi untuk pengunjung. Terlebih lagi terdapat fasilitas kolam renang yang mana kamar mandi sangat dibutuhkan.



Gambar 4.8 Musholla desa wisata Hutan Bambu



Gambar 4.9 Kamar mandi desa wisata Hutan Bambu

3. Kolam Renang dan fasilitas lainnya

Adanya dana desa pada tahun 2016, pihak desa berkomitmen Hutan Bambu untuk dijadikan wisata dan membuat anggaran sekitar 480 juta untuk membangun kolam awal dan parkir mobil serta kantor tiket masuk. Setelah berhasil mendapatkan dana tersebut, tahun 2017 mulai banyak pengunjung yang datang akan tetapi pendapatan masih dianggap sedikit tidak sesuai dengan para pekerja, akan tetapi itu tidak dijadikan masalah karena sifatnya perjuangan untuk menambah ekonomi masyarakat agar lebih baik ke depannya. Setelah kolam selesai proses pembangunan, pengunjung mulai berdatangan. Promosi semakin ramai di media sosial.

Setelah pengunjung semakin ramai berdatangan, dibuatlah spot foto yang semakin menarik wisatawan untuk berkunjung lagi di desa wisata ini. kelompok sadar wisata beserta masyarakat bekerja sama untuk pembangunan spot foto ini. spot foto dibuat semenarik mungkin, pembuatannya berbahan dasar dari bambu agar pengunjung puas. Selain spot foto disediakan juga taman bunga bagi pecinta bunga wajib datang ke desa wisata ini. di tengah taman juga disediakan kursi agar sambil ngobrol sekalian melihat taman bunga di depannya.

Fasilitas desa wisata Hutan Bambu sudah memenuhi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat apalagi di masa pandemi sekarang ini, destinasi wisata sangat menjunjung tinggi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sebelum memasuki tempat wisata, pengunjung di cek suhu terlebih dahulu. Jika suhu melebihi 28 derajat tidak diperbolehkan masuk karena menjaga keamanan pengunjung lainnya. Sesuai yang dikatakan Saudari Anggun selaku pengunjung desa wisata Hutan Bambu:

“Menurut saya fasilitas disini sudah cukup mas, tempatnya sejuk dan asri. Saya dan keluarga senang sekali jika berkunjung di tempat ini. Apalagi anak saya, kita pasti renang jika berkunjung disini, airnya seger banget, ya mungkin dari sumber itu ya. Anak saya juga senang melihat monyet-monyet dan kelelawar yang bergelantungan di pohon mas dengan duduk santai di gazebo, bisa saya jadikan edukasi juga”.
(Sabtu, 10 Oktober 2020, 09.50 WIB)



Gambar 4.10 Kolam Renang desa wisata Hutan Bambu



Gambar 4.11 Beberapa Spot Foto desa wisata Hutan Bambu



Gambar 4.12 Taman Bunga desa wisata Hutan Bambu

4. Kantin dan bengkel bambu

Masyarakat digerakkan untuk selalu mendukung pengelolaan desa wisata dan melakukan keterampilan dan keahlian yang telah dimiliki oleh masyarakat. Ibu-ibu di sekitar lokasi digerakkan untuk berjualan apa saja seperti berjualan nasi, sayur-mayur, memasarkan pernak-pernik, souvenir berasal dari bambu dan yang membuat berbagai kerajinan dari bambu tersebut bapak-bapak yang tinggal di desa. Tempat dari pembuatan bambu tersebut biasa dikenal dengan bengkel bambu. Produk-produk yang dihasilkan sebagian dijual di lokasi destinasi wisata, akan tetapi kebanyakan untuk di ekspor ke luar negeri karena banyaknya permintaan kerajinan bambu dari sana. Sehingga, dengan adanya kerja sama ini membuat perekonomian desa Sumbermujur meningkat dan tercukupi. Pokdarwis juga mengajak masyarakat untuk mengikuti pelatihan batik dan membuat kerajinan batik. Berikut penuturan mas nanang selaku anggota Pokdarwis:

“Kegiatan jual-beli masih lancar disini mas, karena konsumen bukan berasal dari pengunjung saja, melainkan membuka pesanan seperti berbagai macam souvenir, ada juga yang memesan batik kemudian nanti kita sambungkan ke yang memproduksi, jadi dengan adanya desa wisata ini membawa keuntungan juga lah bagi kita ataupun masyarakat desa untuk lebih kreatif dan inovatif lagi dalam memproduksi pohon bambu ini.” (Sabtu, 10 Oktober 2020, 09.30 WIB)

Adanya desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur tentunya akan memberikan manfaat hasil dari kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat. Pokdarwis sendiri mengajak masyarakat untuk berwirausaha seperti mengiswarung di pelataran wisata dan nantinya akan bekerja sama dengan masyarakat

sekitar untuk selalu memajukan desa wisata ini. Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Julaiha selaku pengisi warung pemberian Bank BRI mengatakan:

“saya sangat senang dengan adanya destinasi wisata di sini dek, kenapa saya senang, karena sejak adanya wisata, saya bisa berjualan disini, apalagi pengunjung selalu berdatangan, rame-ramenya itu pas hari Minggu atau setelah hari lebaran, pasti orang-orang memilih tempat ini untuk liburan bareng keluarganya. Semakin ramai pengunjung, semakin laris juga jualan saya, hehehe”. (Sabtu, 17 Oktober 2020, 09.45 WIB)

Sesuai hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dengan didirikannya sebuah desa wisata akan menambah pemasukan para penduduk sekitar. Segi ekonominya masyarakat sekitar akan meningkat, mengingat ramainya wisatawan yang datang mengunjungi wisata tersebut. Seluruh warung penuh diisi oleh masyarakat sekitar, masyarakat sangat antusias untuk berjualan.



Gambar 4.13 Kantin desa wisata Hutan Bambu



Gambar 4.14 Bengkel Bambu desa wisata Hutan Bambu

5. Pemeliharaan Objek Wisata

Pemeliharaan objek wisata sangat penting terutama untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana keindahan serta kenyamanan di lokasi objek wisata. Pemeliharaan bertujuan untuk mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan Sapta Pesona. Berikut hasil wawancara Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis:

“dalam hal pemeliharaan, kita sudah berusaha dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena dapat merusak lingkungan dan pemandangan. Kita juga mengajak masyarakat untuk kerja bakti, kita juga sudah menyediakan banyak tempat sampah di berbagai tempat, tidak lupa pula kita memasang berbagai macam larangan seperti dilarang merusak fasilitas yang ada demi keindahan destinasi wisata.” (Sabtu, 10 Oktober 2020, 09.15 WIB)

6. Pemanfaatan Hasil Kegiatan Kepariwisata

Kegiatan kepariwisataan akan dapat memberikan peluang bagi masyarakat sekitar lokasi pariwisata maupun masyarakat yang telah memanfaatkan kegiatan industri kepariwisataan. Pengelolaan kepariwisataan harus memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurut prinsip yang terdapat dalam konsep kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu adanya pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan harus memberikan nilai manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat. Adanya pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur diharapkan memberikan memberikan nilai manfaat yaitu salah satunya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan bertujuan untuk memperbaiki nilai sosial ekonominya. Berikut merupakan wawancara Bapak Eko Supriyanto selaku sekretaris Pokdarwis Sabuk Semeru:

“oo ya pasti nilai sosial dan ekonominya meningkat mas, soalnya di desa ini banyak pemuda yang belum memiliki kesibukan, dulunya masih suka cangkruk sana cangkruk sini, sampai ada yang menuju ke ranah negatif sebagai contoh minum alkohol, itu semua kami sangat menyayangkan. Pemuda ini generasi yang masih memiliki banyak waktu untuk berkarya. Nah, maka dari itu kami jadikan mereka sebagai anggota Pokdarwis yang akan ikut serta membantu masyarakat untuk berpartisipasi dan mengelola wisata ini, sehingga mereka akan mempunyai kesibukan yang positif”. (Sabtu, 10 Oktober 2020, 09.25 WIB)

Pengarahan atau pelaksanaan merupakan kegiatan melalui komunikasi serta memeberikan motivasi kepada semua anggota yang telah diberi tugas agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan atau pelaksanaan terdiri dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pengurus seperti bagaimana Pemerintah desa beserta Pokdarwis melakukan atau mengerjakan kegiatan di lapangan berupa kegiatan operasional dan bagaimana menyusun tahapan-tahapan pengelolaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang dicocokkan dengan hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan koordinasi pengurus kelompok sadar wisata sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Seperti saat ini, Pokja seksi pengembangan usaha yang menangani berbagai bentuk usaha di sekitar desa wisata mulai dari usaha di area destinasi wisata, usaha kreasi bambu, hingga menciptakan batik bambu masih berjalan sampai sekarang. Masyarakat desa sangat antusias sekali berinovasi dan menciptakan hasil karya dan kerajinan yang hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Koordinasi dan komunikasi antar pokja sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan wisata agar berjalan sesuai dengan tujuan yang dibentuk di awal. Berdasarkan temuan lapangan, pada saat ada kegiatan apa saja yang dilaksanakan di desa wisata seperti, senam bersama dan pertemuan-pertemuan lainnya, anggota kepengurusan kelompok sadar wisata ikut hadir setidaknya ada satu yang mewakili dari masing-masing Pokja, sedangkan anggota yang lain mengerjakan laporan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional pelaksanaan pengelolaan sudah berjalan dengan optimal sesuai tugas masing-masing.

Demi terwujudnya Sapta Pesona, masyarakat yang tidak ikut dalam kepengurusan juga turut membantu dalam kebersihan maupun keamanan di lokasi wisata terlebih lagi ketika ada acara yang diselenggarakan di desa. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Segi keamanan sudah diterapkan dengan baik, seperti penjagaan di pelataran wisata dan tempat parkir di hari-hari biasa sudah dilakukan. Penjagaan di lokasi tempat wisata sangat membantu mengarahkan para pengunjung ke setiap

objek dan juga menjaga keamanan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari segi keindahan sendiri masyarakat di desa Sumbermujur sudah memiliki pola perilaku yang baik seperti cara berpakaian, gaya hidup serta respon positif yang diberikan masyarakat terhadap pengunjung sangat memuaskan. Terlebih pemerintah desa dan kelompok sadar wisata selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu berbuat baik terhadap siapapun yang berkunjung di desanya.

Penyelenggaraan atau pelaksanaan terdiri dari bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepengurusan, bagaimana kelompok sadar wisata melakukan kegiatan operasional di lapangan dan bagaimana kelompok sadar wisata melakukan proses *actuating* kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab kepengurusan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 pasal 9, 10. Tugas dan tanggung jawab kepengurusan juga telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga kelompok sadar wisata. Berdasarkan observasi peneliti yang dicocokkan dengan hasil wawancara pengurus kelompok sadar wisata sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Pengurus kelompok sadar wisata telah menjalankan tugas sesuai formasi bidangnya. Tidak lupa pula dibantu dengan hasil kerja sama yang dibangun dengan masyarakat sekitar sehingga desa wisata ini berhasil menunjukkan bahwa layak untuk mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan desa wisata.

Seksi bidang pengembangan usaha berdasarkan Anggaran dasar dan Rumah Tangga memiliki tugas dan fungsi membuat koperasi, hal ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus, pengurus bekerja sama dengan pemerintah desa. Kemudian seksi bidang keamanan yang bertugas menjaga keamanan lokasi desa wisata sudah dijalankan secara optimal. Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan wisata sangat diperlukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seksi bidang pengembangan usaha dan hubungan masyarakat berdasarkan temuan di lapangan sudah ada koordinasi antara ketua atau wakil kelompok sadar wisata. Tugas dan fungsi bidang sudah dijalankan oleh masing-masing pengurus. Anggota pengurus yang berjumlah 30 orang terlihat masih

aktif semua, hanya saja jika ada yang berhalangan maka segera dicarikan pengganti sementara untuk bertugas pada waktu itu.

Kegiatan operasional di lapangan dilakukan oleh pengurus kelompok sadar wisata, disini masyarakat sebagai subjek kegiatan kepariwisataan. Kegiatan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan sudah berjalan dengan baik dan sudah optimal. Operasional dilaksanakan oleh anggota yang sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Pembagian dilakukan pada agenda rapat rutin demi keadilan bersama. Walaupun sudah terdapat petugas operasional yang ditugaskan, namun masyarakat selalu dan tetap antusias untuk membantu baik itu dalam hal penjagaan tiket, kebersihan maupun keamanan di lokasi wisata. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan monitoring yang dilakukan masyarakat agar pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Sapta Pesona yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan atau pelaksanaan pastinya tidak terlepas dari adanya proses actualing yang dilakukan pengurus kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat ikut mendukung dalam kegiatan kepariwisataan. Dukungan yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan wisata yaitu dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti musholla, kamar mandi, penginapan, spot foto, taman bunga, kantin, bengkel bambu, dan lain-lain. Adanya beberapa analisis tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu sudah berjalan baik dan maksimal. Pengelolaan kepariwisataan sendiri juga harus memberikan nilai manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat dan diharapkan juga dapat memberdayakan masyarakat sehingga dapat merubah atau mengembangkan kehidupan masyarakat desa Sumbermujur. Adanya pengelolaan pariwisata yang ada di desa akan memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi maupun dampak kegiatan sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Nilai kemanfaatan sosial yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa Sumbermujur yakni masyarakat mulai sadar secara perlahan dan memiliki rasa tanggung jawab dengan adanya desa wisata tersebut. Seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan juga gotong-royong membersihkan area pelataran desa

wisata. Adanya desa wisata Hutan Bambu ini juga memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan berinteraksi kepada para pengunjung. Nilai ekonomi dari kegiatan kepariwisataan akan memberikan manfaat hasil yang telah dirasakan masyarakat desa Sumbermujur, seperti dibukanya warung maupun toko di sekitar desa wisata merupakan bentuk peluang bagi masyarakat untuk menambah pendapatan. Selain itu juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyediakan dan mendukung kegiatan kepariwisataan seperti memanfaatkan tanaman bambu sebagai bahan kerajinan yang nantinya menjadi kegemaran pengunjung untuk mengoleksinya. Mendukung kegiatan kepariwisataan yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah desa, pihak pengelola dan masyarakat memberikan pelayanan serta kepuasan bagi para pengunjung.

Masa sekarang yaitu masa pandemi Covid-19, dimana setiap orang harus dan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Covid-19 dapat dicegah dengan tetap dan selalu menjaga kebersihan serta menjaga imun agar tetap kuat. Adanya pandemi ini mengakibatkan seluruh wisata sempat tutup total, kemudian pemerintah mengizinkan wisata dibuka kembali dengan syarat harus dan wajib menggunakan protokol kesehatan. Hal tersebut, membakar semangat pihak pengelola desa wisata Hutan Bambu Pokdarwis Sabuk Semeru untuk menyiapkan sarana apa saja yang diperlukan untuk menjalankan protokol kesehatan demi lancarnya kegiatan wisata walaupun di masa pandemi seperti ini. . Adanya beberapa analisis tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu sudah berjalan baik dan maksimal.

4.2.4 Pengawasan

Proses pengelolaan tidak terlepas dari adanya pengelolaan, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Adanya pengawasan dilakukan bertujuan agar apa yang diinginkan akan menjadi tujuan dalam kegiatan kepariwisataan. Pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pihak pengelola desa wisata yaitu

Pokdarwis “Sabuk Semeru”. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melakukan pemantauan dengan cara mendatangi destinasi wisata setidaknya satu bulan sekali sedangkan pihak pengelola Pokdarwis melakukan evaluasi atas apa yang telah dilakukan selama destinasi wisata berjalan. Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah catatan selama satu bulan, baik catatan kelebihan maupun kekurangan destinasi wisata. Pihak pengelola melakukan evaluasi, mengadakan rapat dan membuat laporan pertanggungjawaban. Sesuai hasil wawancara Bapak Cipto Adi selaku devisi Pengelolaan dan Pengembangan;

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selain melakukan fasilitator berupa pelatihan kami juga bertugas melakukan monitoring melalui pembimbingan dan diskusi yang saya lakukan dengan Bapak Agus selaku pengurus kelompok sadar wisata. Biasanya saya melakukan monitoring satu bulan sekali untuk mengunjungi kegiatan pengelolaan di lapangan. Sampai saat ini yang dikeluhkan adalah anggaran, namun kita dari pihak dinas belum bisa memberikan dana pengembangan”. (Senin, 28 September 2020, 08.45 WIB)

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Agus Wijaya selaku wakil ketua Pokdarwis mengatakan:

“Pengawasan, untuk pengawasan dalam pengelolaan yang diterima oleh Pokdawis sendiri berupa evaluasi, mas. Terkait dengan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh kami, kemudian ada tambahan sarana dan prasarana apa saja, bagaimana kami menggunakan dan memanfaatkan sarana tersebut, itu kami harus melaporkan berupa laporan pertanggungjawaban ke Dinas Pariwisata yang ada di kabupaten Lumajang, ada monitoring juga suatu ketika pihak Dinas Pariwisata akan datang ke wisata Hutan Bambu ini biasanya juga satu bulan sekali.”. (Sabtu, 17 Oktober 2020, 09.35 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu terdiri dari monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Lumajang dan pemerintah desa Sumbermujur. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh Pokdarwis dengan cara melaporkan pertanggung jawaban tugas dari hasil kegiatan kepariwisataan serta meminta dukungan kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan bersama pemerintah desa dan masyarakat dengan memberikan saran dan masukan terhadap pengelola desa wisata tersebut.

Dengan adanya covid 19 terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak hutan bambu dalam melakukan pengawasan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dimana setiap pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan melakukan jaga jarak. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus covid tetap terkendali dan pengunjung tetap bisa menikmati wisata alam hutan bambu dengan aman. Apabila ada yang melanggar maka tidak diperbolehkan masuk area hutan bambu.

Pengawasan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berbasis kelompok sadar wisata ini dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dan masyarakat sekitar yang nantinya memberikan saran dan masukan terhadap destinasi wisata yang sudah dikelola. Proses pengawasan dilakukan oleh Dinas Kabupaten satu bulan sekali, tanpa diketahui hari dan tanggal berapa, kemudian pihak pengelola memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu bulan kepada Dinas. Selain itu pihak pengelola juga mendapatkan evaluasi dari masyarakat mengenai kelebihan dan kekurangan apa yang perlu dibenahi sehingga menjadikan destinasi wisata ini berkembang dengan baik. Hasil dari proses pengawasan ini sudah berjalan sesuai prosedur, dan selama ini masyarakat, pemerintah desa, dan pokdarwis sudah melakukan kerja sama yang baik dalam menjaga dan melestarikan potensi wisata yang ada di desa Sumermujur.

Pengawasan atau disebut pengendalian merupakan fungsi manajemen berupa mengadakan penelitian, dan jika perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan sesuai tujuan yang telah digariskan semula. Menurut teori G.R Terry dalam Hasibuan (2006: 242) pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan atau pengendalian dalam proses pengelolaan Desa Wisata Hutan Bambu dapat dilihat dari standar pengawasan yang diberlakukan.

Proses pengelolaan pengawasan merupakan hal penting di dalam penyelenggaraan kegiatan desa wisata Hutan Bambu. Pengawasan sendiri

bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dengan intruksi yang sudah ditentukan serta mengetahui kesulitan dan kelemahan yang dihadapi oleh pengelola dalam kegiatan desa wisata Hutan Bambu. Adanya pengawasan juga bertujuan agar menjadi wadah masyarakat dalam mengeluarkan pendapat berupa kritik dan saran kepada pengelola, pengawasan dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Selain monitoring dan evaluasi, ada bentuk pengawasan secara langsung oleh pihak POKDARWIS SABUK SEMERU. Bentuk pengawasan tersebut adalah adanya penjaga ticketing, tim kebersihan pemandian dan kantin, tim pemeliharaan sumber air, tim pemeliharaan bambu dan tim kebersihan lingkungan area wisata hutan bambu. Pengawasan tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali kecuali penjaga ticketing yang harus bekerja setiap hari. Pengawasan tersebut diharapkan mampu untuk menjaga hutan bambu dari segi kealamiannya serta finansialnya. Bentuk pengawasan tersebut juga tidak lepas dari kelemahan, seperti petugas ticketing yang tidak profesional, memasukkan orang luar daerah secara gratis, itupun menjadi sebuah kelemahan yang muncul dan harus diperbaiki kualitas SDM nya. Karena apa, kelemahan tersebut dapat memicu berkurangnya pendapatan finansial hutan bambu itu sendiri dan dapat menghambat pembangunan apabila keuangan tidak dikelola dengan baik dan dipakai secara sembrono sehingga diharapkan untuk tim yang lain harus profesional dalam menjaga hutan bambu ini agar tetap dicintai oleh para wisatawan.

Monitoring sendiri dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang. Bagian monitoring yaitu dari bidang pariwisata secara rutin. Kegiatan yang dilakukan antara lain melihat apa saja yang menjadi kekurangan atau masalah yang terjadi di lapangan, memberikan masukan-masukan bagi pihak pengelola serta memberikan dukungan, saran, dan arahan. Selain itu dalam proses monitoring, pihak pengelola yaitu kelompok sadar wisata desa wisata Hutan Bambu wajib mengirimkan laporan keuangan dan pengunjung kepada Disparpora setiap bulannya. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak pengelola maupun masyarakat. Evaluasi sendiri dilakukan dengan memberikan masukan dan saran dalam kegiatan pengelolaan desa wisata yang kurang maksimal. Masyarakat

sendiri memberikan masukan dan ide yang menjadi kekurangan bagi pihak pengelola, selain itu masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Berdasarkan uraian di atas, maka pengawasan dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu sudah berjalan secara efektif dan optimal.

Proses pengelolaan yang telah dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola desa wisata Hutan Bambu yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sudah berjalan dengan optimal dan semuanya sudah sesuai prosedur sesuai kesepakatan bersama. Komunikasi yang dibangun antar pemerintah, pengelola, dan masyarakat sudah sangat baik, saling terbuka demi terciptanya desa wisata yang sejuk dan indah. Semua pengurus dari kelompok sadar wisata sudah menalankan tugas dengan baik. Mengenai akses jalan menuju ke desa wisata sangat mudah, hal lain seperti donatur dan kerja sama antar pihak juga berjalan dengan lancar.

Dalam rangka bentuk pengawasan dari Desa dan Kelompok Sadar Wisata, maka terbitlah Peraturan Desa tentang Alam Desa Sumbermujur Lestari dan Berkelanjutan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2017.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan mengenai pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur, yang dianalisis menggunakan pengelolaan berbasis kelompok sadar wisata, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan desa wisata Hutan Bambu sudah dilakukan dengan baik dan maksimal oleh pemerintah desa, kelompok sadar wisata, dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Pengelolaan desa wisata ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Hasil analisis pengelolaan desa wisata Hutan Bambu berbasis kelompok sadar wisata meliputi analisis perencanaan sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan penyusunan proposal, kemudian peresmian lokasi desa wisata, pembentukan kelompok sadar wisata, dilakukan promosi, menjalin kerja sama, menyusun program-program ke depan. Perencanaan sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit kendala dikarenakan ada wabah covid 19 dimana pembangunan menjadi terhambat. Keterlibatan masyarakat sangat baik dalam musyawarah perencanaan pembukaan destinasi, membentuk organisasi pokdarwis, membentuk kepengurusan, mengusulkan dan melaksanakan pembangunan program kerja dalam pengelolaan desa wisata Hutan Bambu Sumbermujur.
3. Pengorganisasian sudah dibentuk struktur organisasi pengelola serta memperhatikan kapasitas SDM organisasi pengelola.
4. Penyelenggaraan atau pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di desa wisata dilakukan kelompok sadar wisata dan dibantu oleh masyarakat sekitar serta sudah terealisasi dengan baik.
5. Pengawasan terdiri dari monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh dinas kebudayaan pariwisata dan pemerintah desa. Evaluasi dilakukan oleh masyarakat berupa kritik dan saran tentang pengelolaan wisata hutan bambu sumbermujur. Adapun tambahan terkait wabah covid 19 pengelola mewajibkan

seluruh pengunjung yang masuk area wisata harus memakai masker dan menjaga jarak, apabila tidak mematuhi pengunjung tidak diperbolehkan masuk.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan mengenai pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur, yang dianalisis menggunakan pengelolaan berbasis kelompok sadar wisata, didapatkan saran sebagai berikut.

1. Adanya pengkajian tentang pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur dapat dijadikan acuan untuk mengetahui gambaran secara mendalam bagaimana konsep pengelolaan yang baik. yang terlibat mulai dari dinas pariwisata, pemerintah desa, pokdarwis, masyarakat, maupun pihak lain yang terlibat harus tetap menjunjung tinggi semangat dan optimis dalam menjalankan tugas. Pantang menyerah adalah kunci untuk melawan di masa sulit pandemi covid 19 ini dengan segera menerapkan protokol kesehatan.
2. Pengelolaan desa wisata Hutan Bambu di desa Sumbermujur dapat memberikan motivasi, semangat, dan pembelajaran bagi kelompok sadar wisata lainnya agar lebih memahami arti penting dari dibentuknya kelompok sadar wisata demi kemajuan pariwisata.
3. Pemerintah sebaiknya selalu berusaha untuk lebih transparan dan fleksibel terhadap pengelolaan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Perlu adanya pembinaan secara instensif dari pihak dinas pariwisata terhadap kelompok sadar wisata di masa pandemi ini dalam melaksanakan kepariwisataan yang aman, dan nyaman bagi pengunjung.
4. Pengurus kelompok sadar wisata sebaiknya berkoordinasi secara jelas dalam melakukan pembagian tugas dan melakukan pelaporan ketika rapat yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Anwaruddin, Awang. 2010. *Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik*. Diakses tanggal 7 Mei 2020
- Azhari, Baihaqi & Bramanti. 2018 *Identifikasi Risiko Green Suplychain Management*. *Jurnal Pariwisata*. Diakses tanggal 2 Maret 2020
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teori, dan Problema Pelayanan Publik)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Frisdiantara, Chritea & Mukhlis, Imam. 2016. *Ekonomi Pembangunan. Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang.
- Handoko, T. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi revisi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- KBBI. Pengelolaan. <https://bit.ly/361xEx4>. Diakses tanggal 26 April 2020
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufiz, Ali. 2014. *Materi Pokok Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Mustopadidjaja. 2002. *Paradigma-Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi publik Republik Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pariwisata Lumajang. 2012. <https://bit.ly/2WVqOFa>. Diakses tanggal 6 Maret 2020

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Wisata

Peraturan Desa No. 06 Tahun 2014 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Sabuk Semeru Hutan Bambu

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Setiadi, Trisnanda. 2015. Manfaat Informasi Akuntansi, Persepsi Risiko dan Revisi Keyakinan Investor Individu terhadap Investasi Pemilihan Saham dengan Risiko *Unsystematic* sebagai Variabel Intervening. Diakses tanggal 5 Maret 2020

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sj. Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumarto. 2009. Meningkatkan Komitmen dan Kepuasan untuk Menyurutkan Niat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.11 No, 2 116-125. Diakses tanggal 6 Mei 2020

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Mujur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus kelembagaan Kelompok Sadar Wisata

Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Utami, R. C., & Hartono, D. 2016. Analisis Daya Saing Harga Pariwisata Indonesia: Pendekatan Elastisitas Permintaan. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, Vol.11 No, 93-118. Diakses tanggal 2 Maret 2020

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI

Wibowo, R. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbit Universitas Jember

Wilopo, Dimas. 2016. Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.32 No,2. Diakses tanggal 18 April 2020

Y. Wayong. 2005. *Fungsi Administrasi Negara*. Jakarta: Djambatan

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

